Dr. Mohammad Liwa Irrubai

WAWASAN IPS

UIN MATARAM PRESS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

WAWASAN

IPS

Dr. Mohammad Liwa Irrubai, M.Pd.

WAWASAN IPS

UIN MATARAM PRESS

WAWASAN IPS
© Sanabil 2021

Penulis : Dr. Mohammad Liwa Irrubai, M. Pd
Editor : rusmawan
Layout : Sanabil Creative
Desain Cover : Sanabil Creative

All rights reserved
Hak Cipta dilindungi Undang Undang
Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-954-995-4
Cetakan 1 : Desember 2021

Penerbit:
UIN Mataram Press
Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Center Lt. 1)
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru
Kota Mataram – NTB 83116
Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499
Email: uinmatarampress@gmail.com
http://lp2m.uinmataram.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menjalankan aktifitas keseharian dan buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. bersama para sahabat dan ummatnya sampai hari akhir nanti. Aamiin.

Buku Wawasan IPS ini terbit berdasarkan amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan. Penulisan buku ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.

Kurikulum pendidikan tinggi, menurut Kepmendiknas No. 232/U/2000, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar perguruan tinggi. Penulisan buku dapat memenuhi kualitas standar pendidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan keputusan Kurikulum Jurusan Pendidikan IPS FTK UIN Mataram yang dirumuskan dengan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan juga memperhatikan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang telah digariskan pada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Selain itu, sejumlah buku pedoman dan pengaturan terkait dengan penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi beracuan KKNI dan SNPT dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peninjauan kurikulum, maka pembuatan buku Wawasan IPS sangat penting untuk menunjang profesional dosen dan kualitas lulusan mahasiswa dalam memahami konsep, prinsip dan teori keilmuan Pendidikan IPS dalam menjalankan tugas sebagai guru pada mata kuliah Wawasan IPS di Jurusan Pendidikan IPS-Ekonomi, FTK UIN Mataram.

Buku ini membahas tentang: Bab I Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial, Bab II Kultur Akademik Pendidikan IPS, Bab III Teori dan Generalisasi, Bab IV Materi Pendidikan IPS, Bab V Pembelajaran Pendidikan IPS, Bab VI Pendidikan IPS dalam Globalisasi, Bab VII Nilai dan Kearifan Lokal.

Buku ini bisa terbit atas masukan dan saran dari berbagai pihak, penulis ucapkan terima kasih semua telah

memberikan motivasi yang luar biasa bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini.

Mataram, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix

BAB 1 HAKIKAT ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 1
A. Istilah IPS dan Pendidikan IPS 1
B. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 10
C. Landasan Filosofis Ilmu Pengetahuan Sosial 14

BAB 2 KULTUR AKADEMIK PENDIDIKAN IPS 21
A. Sejarah Perkembangan IPS 21
B. Sejarah Perkembangan IPS di Indonesia 25
C. Latar Belakang Terbentuknya IPS 30

BAB 3 FAKTA, KONSEP, TEORI DAN GENERALISASI 41
A. Fakta 41
B. Konsep 43
C. Teori dan Generalisasi 46

BAB 4 MATERI PENDIDIKAN IPS 51
A. Sosiologi 53
B. Antropologi 54
C. Ekonomi 56
D. Geografi 56
E. Sejarah 58
F. PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) 59

BAB 5 PEMBELAJARAN PENDIDIKAN IPS 63
A. Gambaran Model Pembelajaran IPS 63
B. Model-Model Pembelajaran IPS 69
C. Teknik-teknik Pembelajaran IPS 82

BAB 6 PENDIDIKAN IPS DAN GLOBALISASI.....85
A. Menelusuri Makna Globalisasi.....85
B. Keterkaitan Identitas Nasional dengan Globalisasi....87
C. Glokalisasi 91

BAB 7 NILAI DAN KEARIFAN LOKAL.....93
A. Nilai.....93
B. Kearifan Lokal 109

DAFTAR PUSTAKA.....121
BIODATA PENULIS.....129

B A B

1

HAKIKAT ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

A. Istilah IPS dan Pendidikan IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial yang disingkat IPS dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan sosial yang sering kali disingkat Pendidikan IPS atau PIPS merupakan dua istilah yang sering diungkapkan atau dituliskan dalam berbagai karya akademik secara tumpang tindih (*Overlaping*).[1] Kekeliruan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosiaisasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi. Faktor lain dimungkinkan karena kurangnya forum akademik yang membahas dan memasyarakatkan istilah atau nomenklatur hasil kesepakatan komunitas akademik.

Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai kesepakat komunitas akademik dan scara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975, dalam dokumen kurikulum tersebut IPS

1 Sapriya, *Pendidikan IPS Konsep Dan Pembelajaran* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 2009. hlm. 7

merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi, serta pembelajaran ilmu-ilmu sosial lainnya. Nama IPS ini sejajar dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengtahuan Alam yang disingkat dengan IPA sebagai integrasi dari nama mata pelajaran Biologi, Kimia, Fisika. Menurut Somantri, penggunaan istilah IPS dan IPA dimaksudkan untuk membedakannya dengan nama-nama disiplin ilmu di universitas.[2]

Ciri khas IPS dan IPA sebagai mata pelajaran jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah sifat terpadu (*integrated*) dari sejumlah mata pelajaran dengan tujuan agar mata pelajaran ini lebuh bermakna bagi pesert didik sehingga pengorganisasian materi/bahan pelajaran disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan,peserta didik. Oleh karena itu, dalam perkembangannya muncul berbagai pendekatan yang beroriensitas pada kebutuhan peserta didik seperti *students' centered, integrated approach, social problem based approach, broadfield approach,* dan sebagainya.

Dalam lingkup filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial, dan ilmu pendidikan, istilah Pendidikan IPS belum dikenal baik sebagai subdisiplin ilmu atau cabang-cabang dari disiplin ilmu. Dalam kepustakaan asing, istilah yang lazim digunakan antara lain, *Social Studies, Social Education, Social Studies Education, Social Science, Education, Citizenship Education, Studies of Society, and Empiroment*. Perbedaan istilah ini menunjukkan pada sistem lingkungan, baik alam maupun manusia dan bagaimana sistem itu berinteraksi dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Disiplin ilmu yang dikembangkan secara umum memiliki persamaan dengan *social studies* pada umumnya ialah mengacu pada disiplin ilmu-ilmu sosial.

2 Ibid

Tujuannya ialah memberikan kesempatan kepda para siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan mereka dapat menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis.

1. Pengertian IPS

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial, disingkat IPS, merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah *"Social Studies"* dalam kurikulum persekolahan dinegara lain, Khususnya di negara-negara Barat seperti Australia dan Amerika Serikat. Nama "IPS" yang lebih dikenal dengan *social studies* dinegara lain itu merupakan istilah hasil kesepakatan dari para ahli atau pakar kita di Indonesia dalam Seminar Nasional tentang *Civic Education* tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. IPS sebagai mata pelajaran di persekolahan, pertama kali digunakan dalam Kurikulum 1975.[3]

Di negara bagian Barat, istilah *Social Studies* pertama kali ditemukan oleh Edgar Bruce Wesley yang juga disebut sebgai pilar historis. Ia mengemukakan bahwa *"Social Studies are the Social Sciences Simplified Pedagogical Purpose"*. Maksudnya bahwa *social Stadies* merupakan Ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk pendidikan. definisi ini kemudian dibakukan dalam *The United States Of Education's Standard Terminology for Curriculum and Instruction* sebagai berikut: *"the Social Studies comprised of those aspects of history, economics, political science, sociology, anthropology, psychology, geography, and philosophy which in practice are selected for purposes in school and collegs"*.[4]

---

3 Sapriya, *Pendidikan IPS Konsep Dan Pembelajaran* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 2009. hlm. 19

4 Dadang Supardan, *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Perspektif Filosofi dan Kurikulum,* (Jakarta : Bumi Aksara), 2015. hlm.9

Sedangkan dalam *National Cauncil for the Social Stadies* atau NCSS dikemukakan: *"Social Stadies is basic subject of the K-12 curriculum that (1) derives its goals from the nature citizenship an the democratic society that is closely linked to other nations and people of the world; (2) draw its content prima-rily from history, the social sciences, and in some respect from humanities and science; and (3) is taught in ways that reflect an awareness of the personal, social, and cultural experiences and developmental level of learners"*[5]

Di Negara Indonesia sendiri, pandangan para ahli tentang IPS di lingkungan IKIP Bandung (UPI sekarang). Pandangan tokoh IPS seperti Achmad Sanusi, menurut pendapatnya *Studi Sosial* adalah pembahasan yang analitis-interdisipliner mengenai masalah masalah sosial yang terpilih, empiris, dan kontemporer.[6] Memiliki batasan tersebut terdapat kesan bahwa studi sosial adalah pengkajian dengan pendekatan interdisipliner terhadap problem-pronlem kemasyarakatan yang *meaningful.* Ciri-ciri yang dapat dilihat dalam studi ini *problem oriented scientific organized* dan *interdisciplinary approach*. Tampaknya konsep ini sangat benar untuk universitas. Dalam tulisan yang lain ditegaskan bahwa Studi Sosial hendaknya mempunya fungsi edukatif dan latihan intelektual.

Sedangkan M. Nu'man Somantri mengenai IPS, kita dapat menangkap buah pikirannya, antara lain bahwa ciri-ciri Studi Sosial terlihat dari cara pengorganisasian bahan pelajaran yang menekankan pada *scientific* dan psikologis. Dan dapat pula kita pahami bahwa *Social Studies* harus tepat memelihara unsur keilmuannya sementara sebagai program pembelajaran harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga cukup memperlihatkan perkembangan peserta didik. Tokoh IPS lainnya, Kosasih, mendefinisikan IPS sebagai berikut: IPS (*Social Studies* atau Studi Sosial) merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang

5 Ibid. hlm. 11

6 Ibid. hlm 14

ilmu pengetahuan sosial dan ilmulainnya serta kemudian diolah berdasarkan perinsip pendidikan dan didaktik untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa menurut A. Kosasih Djahiri bahwasannya IPS merupakan ilmu, IPS sebagai ilmu yang ditampilkan dalam bentuk paduan (fusi) dengan konsep-konsep pilihan, yang bahan-bahannya diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai program pembelajaran.

Sedangkan menurut kurikulum, IPS memiliki perkembangan serta pembaharuan di dalam mendefinisikannya, yang pada mulanya pengembangan IPS pada kurikulum 1975 dan pada kurikulum 1984. Pengembangan Kurikulum 1975 merupakan awal baru dalam perkembangan kurikulum di Indonesia, yang mana kurikulum ni tidak dikembangkan oleh Kementrian / Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan tetapi oleh suatu lembaga di bawah Kementrian tersebut yang dinamakan Pusat Pengembangan Kurikulum. Kurikulum ini menggunakan model pengmbangan yang lebih jelas yang dikenal dengan metode pendekatan tujuan. Model pendekatan tujuan ini juga dikenal pula dengan nama model Tyler dan mempunyai pengaruh yang besar di Amerika Serikat. Pada fase ini pengaruh pendidikan Amerika Serikat mulai menguat di Indonesia terutama melalui yang pulang belajar dari negara tersebut.

Selain model pengembangan, dalam kurikulum baru ini, digunakan pula pendekatan pengembangan kurikulum yang berbeda dari kurikulum yang sebelumnya. Jika dalam kurikulum sebelumnya disebutkan nama disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai nama mata pelajaran maka dalam kurikulum 1975 ini digunakan nama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam kurikulum SMP, IPS melipputi disiplin ilmu Geografi, Sejarah, dan Ekonomi sebagai disiplin ilmu utama. disamping itu digunakan juga materi pembelajaran dari disiplin ilmu

Sosiologi, Politik dan Antropologi. Di dalam kurikulum SMA, IPS meliputi Geografi, Ekonomi, dan Sejarah.

Di dalam Kurikulum 1975 ini dinyatakan bahwa IPS adalah paduan (fusi) dari sejumlah mata pelajaran sosial. Definisi IPS yang digunakan kurikulum 1975 agak sedikit berbeda, dalam definisi itu dikatakan bukan paduan dari sejumlah mata pelajaran ilmu sosial tetapi sejumlah mata pelajaran sosial. dari pernyataan diatas ditegaskan didalam dokumen kuriklum yang disebut Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang dimaksudkan sebagai mata pelajaran sosial adalah disiplin ilmu-ilmu sosial. Untuk IPS SMP disebutkan bahwa materi pembelajaran IPS ditunjang Geografi dan kependudukan, sejarah, dan ekonomi koperasi. Sedangkan untuk SMA IPS mencangkup geografi dan kependudukan, sejarah, antropologi budaya, ekonomi dan koperasi, serta tata buku dan hitung dagang. Jadi, Orientasi pendidikan IPS pada pendidikan disiplin ilmu jelas tergambarkan dalam dokumen kurikulum. Artinya, integrasi yang dimaksudkan adalah Integrasi materi dari berbagai disiplin ilmu tersebut.

Di dalam Kurikulum 1984 dikatakan sebagai penyempurna dari Kurikulum 1975. Dalam Kurikulum 1984, IPS digunakan hanya untuk menyebutkan nama bidang studi di SMP. Disiplin ilmu yang disebutkan untuk IPS SMP lebih luas dari Kurikulum 1975. Disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, hukum, politik, dijadikan baru bagi IPS. Selain jumlah disiplin ilmu terdapat perbedaan lain antara kurikulum 1984 dengan kurikulum sebelumnya. dalam kurikulum 1984 bentuk matriks masih digunakan tetapi tujuan kurikuler tidak lahi terbagi-bagi dalam tujuan-tujuan dalam satu ilmu tertentu. Dalam GBPP kurikulum 1984 IPS SMP hanya terdapat dua tujuan kurikuler yaitu tujuan kurikuler untuk sejaran dan tujuan kurikuler bukan sejarah. Tujuan kurikuler bukan sejarah adalah tujuan tujuan kurikuler untuk Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Antropologi, Politik, Hukum,

Lingkungan Hidup, dan keluarga berencana yang dirumuskan dalam satu tujuan kurikuler.

Berbeda dengan SMP, nama IPS sudah tidak lagi digunakan untuk kurikulum SMA. Di SMA, nama mata pelajaranyang mewakili pendidikan ilmu-ilmu sosial diberi judul yang sama dengan nama disiplin itu sendiri. Pendidikan ilmu-ilmu sosial di SMA diwakili mata pelajaran sejarah, ekonomi, geografi, antropologi-sosiologi, dan tata negara. Setiap disiplin ilmu yang disebutkan tadi merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Dengan demikian masing-masing memiliki GBPP sendiri yang berbeda secara fisik terpisah dan tidak berhuungan dalam isinya.

Di dalam kurikulum 1984 ini menggunakan pendekatan atau bentuk pengajaran yang digunakan yaitu pendekatan integrative dan pendekatan struktural untuk IPS SMP dan pendekatan disiplin yang terpisan (*separated disciplinary approach*) untuk SMA. Kajian GBPP IPS SMP, dalam GBPP dinyatakan bahwa pendekatan integratif yang digunakan adalah pendekatan integratif sesuai dengan realita kehidupan. Artinya bahwa, kurikulum 1984 IPS SMP menggunakan pendekatan integratif sepanjang berkaitan dengan pengembangan Tujuan Kurikuler, Tujuan Instruksial Umum, sebagai Pokok Bahasan dan Uraian Pokok Bahasan. sedangkan pendekatan struktural yang dikemukakan dalam GBPP IPS SMP adalah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan pengertian konsep-konsep danri generalisasi secara luas dan mendalam. Nu'man menbartikan bahwa pendekatan struktural merupakan pendekatan yang berdasarkan struktur disiplin ilmu yang bersangkutan. Dalam pendekatan ini maka dimungkinkan adanya pengembangan materi yang berasal dari dimensi subtansi dan dari dimensi metodologis keilmuan yang bersangkutan.

Di SMA bentuk pengajaran yang diharapkan jelas bentuk penddikan disiplin yang terpisah (*separated disciplinary*

approach). Setiap mata pelajaran meiliki GBPP masing-masing. Kajian terhadap GBPP pun jelas menunjukkan bahwa setiap mata pelajaran hanya memperhatikan apa yang akan dibahas di mata pelajaran yang bersangkutan (dalam hal ini mata pelajaran sama dengan disiplin ilmu).

Di dalam Kurikulum 1994, IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian Geografis, Ekonomi, Sosiologi, Antropologi, Tata Negara dan Sejarah". Pelajaran IPS yang diajarkan di SD terdiri dari dua bahan kajian, yaitu pengetahuan sosial yang mencakup lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, dan pemerintahan. Bahan kajian sejarah meliputi perkembangan masyarakat indonesia sejak masa lampau hingga masa kini.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang mengajarkan pada siswa SD agar mereka kelak mengenal fenomena alam dan fenomena sosial mulai dari lingkungan yang dekat sampai kepada lingkungan yang lebih jauh (dunia). IPS merupakan mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan kewarganegaraan (KTSP, 2006).

Konten pendidikan IPS dalam Kurikulum 2013 meliputi: 1) pengetahuan: tentang kehidupan masyarakat di sekitarnya, bangsa dan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan lingkungannya; 2) keterampilan: berpikir logis dan kritis, membaca, belajar (*learning skills, inqury*), memecahkan masalah, berkomunikasi dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat-berbangsa; 3) nilai-nilai kejujuran, kerja keras; sosial, budaya, kebangsaan, cinta damai dan kemanusiaan serta kepribadian yang didasarkan pada nilai-nilai tersebut; 4) sikap: rasa ingin tahu, manidri, menghargai prestasi, kompetitif, kreatif dan inovatif serta bertanggung jawab.

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai salah satu matapelajaran dalam Kurikulum 2013 juga berorientasi pada kompetensi yang utuh tersebut. Pelajaran IPS merupakan integrasi dari empat mata pelajaran yaitu geografi, ekonomi, sosiologi dan sejarah. Keempat mata pelajaran tersebut dipadukan oleh konsep ruang dan interaksi antar ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.

Dari berbagai penjelasan di atas, Numan Somantri mengidentipikasikan sejumlah karakeristik dari ilmu-ilmu sosial antara lain sebagai berikut:[7]

1. Berbagai batang tubuh (*body of knowledge*) disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah.
2. Batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya.
3. Batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial ini disebut juga *structure* disiplin ilmu, atau ada juga yang menyebutnya dengan *fundamental ideas.*
4. Teori dan generalisasi dalam struktur itu disebut pula pengetahuan ilmiah yang dicapai lewat pendekatan *"conceptual"* dan *"syntatis"* yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data (observasi dan eksperimen).
5. Setiap teori dangeneralisasi ini terus dikembangkan, dikoreksi, dan diperbaiki untuk membantudan menerangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan serta membantu memecahkan masalah-masalah sosial melalui pikiran, sikap, dan tindakan terbaik.

---

7 Sapriya, Pendidikan IPS Konsep dan Pengajaran. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya). 2009. hlm. 22

B. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial

Visi pembelajaran *social studies* /IPS yang diperlukan untuk mencapai tingkat keberhasilan masyarakat dan bangsa sehingga memerlukan kesungguhan pembelajaran yang komprehensif. Kita tidak sedang menguraikan program *social studies*/IPS pada jenjang satuan pendidikan maupun kelas tertentu.

Namun, penekanannya adalah pada prinsip-prinsip pembelajaran yang diterapkan secara lebih utuh dan komprehensif pada seluruh tingkat satuan pendidikan dan semua kelas. Pembelajaran *social studies*/IPS tersebut hendaknya menjadi pelajaran yang kuat dan kokoh (*powerful*) dengan berbasis pada pembelajaran yang bermakna (*meaningful*), integratif (*integrative*), berbasis nilai (*value-based*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*active*) siswa belajar.[8]

Tugas penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga Negara yang demokrasi adalah kompleks dan sangat berat. *Social studies*/IPS yang diramu dari berbagai disiplin ilmu sosial yang beragam meliputi berbagai konten yang ekspansif dan potensial. Konten ini melibatkan para siswa dalam proses komprehensif menghadapi beberapa dilema, dan mendorong sisaa untuk merefleksi masalah-masalah sosial, berpikir kritis, dan membuat keputusan pribadi maupun kelompok berdasarkan informasi dari berbagai perspektif. Sebuah kurikulum *social studies*/IPS yang kuat dan kokoh akan memberikan strategi dan kegiatan pembelajaran utuh dan komprehensif. Pembelajaran semacam itu melibatkan para siswa dengan ide-ide yang signifikan, dan mendorong mereka untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari dan pengetahuan mereka sebelumnya miliki dan isu-isu

8 NCSS. (1979). *Charting a course: Social studies for the 21st century: A report of the curriculum task force of the national commission on social studies in the schools.* (Washington: NCSS.) 1979. hlm.3

saat ini, untuk berpikir kritis dan kereatif tentang apa yang mereka pelajari, dan untuk menerapkan dalam setuasi yang autentik.[9]

Tujuan pendidikan ilmu sosial di sekolah menengah adalah untuk membina peserta didik menjadi anggota masyarakat yang dikehendaki bangsa dan masyarakatnya. Tujuan semacam ini merupakan tanggung jawab formal dan moril pendidikan suatu disiplin ilmu di tingkat sekolah.

Dalam hal pemilihan materi maka pendidikan ilmu-ilmu sosial di jenjang persekolahan melakukan pemilihan yang sangat berorientasi kepada kepentingan pendidikan, bukan pada keilmuan semata. Pertimbangan keilmuan digunakan dalam melihat apakah ruang lingkup materi sudah cukup, validitas materi yang dipilih, serta tata urutan materi dalam kurikulum. Bagaimana materi itu dikuasai sangat tergantung pada pendekatan pendidikan yang dianut. Tetapi cara menguasai materi itu sangat kuat berorientasi pada teori pendidikan yang ada; proses pemahaman suatu materi seperti yang dikembangkan dalam psikologi belajar dijadikan landasan mengembangkan proses belajar.

National Council for the Social Studies (1979) mengungkapkan bahwa *the primary purpose of social studies is to help the young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.*

Dalam rumusan tujuan IPS menurut NCSS dijelaskan bahwa tujuan utama mata pelajaran IPS yaitu untuk membantu orang-orang muda dalam hal ini peserta didik atau siswa agar mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional untuk kepentingan publik sebagai warga masyarakat demokratis yang beragam dalam

9 C. Z. Sunal, and M. E. Haas. *Social Studies and The Elementary/Middle School Student*, (New York: Holt Rinchart and Winston. Inc.). 1993. hlm.53

saling ketergantungan dunia. Dengan kata lain tujuan utama diberikannya mata pelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik.

Tujuan IPS menurut NCSS tampaknya menjadi acuan ahli-ahli IPS. Jarolimek (2002, hlm. 4) menuliskan tentang tujuan IPS: *"The major mission of social studies education is to help children learn about the social world in which they live and how it got that way; to learn to cope with social realities, and to develop the knowledge, attitudes, and skills needed to help shape an enlightened humanity".*[10]

Secara jelas Jarolimek mengemukakan bahwa pada dasarnya IPS memiliki misi bagi peserta didik untuk dapat belajar dan memahami lingkungan sosial di sekitarnya dengan cara mengembangkan pengetahuan, perilaku, dan kompetensi yang akan mendukung dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagai bidang ajar, IPS memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bentuk konsep dan pengalaman belajar yang dipilih atau diorganisasikan dalam rangka kajian ilmu sosial.

Zevin menulis bahwa pada dasarnya tujuan IPS/*social studies* meliputi tiga hal, yaitu:[11]

1. Tujuan didaktis (*didactic goal*), yaitu: mengirimkan pengetahuan tentang masa lalu.

---

10 J. Jarolimek. *Social Studies in Elementary Education, Seventh Edition*. (New York: Macmillan Publishing Co). 2002. hlm.4

11 Zevin, J., *Social Studies for The Twenty-First Century, Methods and Materials for Teaching in Middle and Scondary schools, (Third Edition)*. (New York: Routledge Taylor and Francis Group). 2007. hlm.15

2. Tujuan reflektif (*reflective goal*), yaitu: menyimpulkan,menganalisis, dan mengaplikasikan informasi dan data.
3. Tujuan afektif (*affective goal*), yaitu: mencakup moral, f*eeling*, emosi, dan nilai.

Menurut Chapin dan Messick (1992), mengemukakan tujuan pembelajaran sebagai :

1. Memberikan pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam bermasyarakat pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang.
2. Mengembangkan keterampilan untuk mencari dan mengolah informasi
3. Mengembangkan nilai sikap demokrasi dalam bermasyarakat
4. Menyediakan kesempatan siswa untuk berperan serta dalam kehidupan sosial
5. Ditujukan kepada peserta didik untuk mampu memahami hal yang bersifat konkrit, realistis dalam kehidupan social.

Awan Mutakin tujuan pembelajaran IPS adalah membantu individu untuk meningkatkan aspek ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai keterampilan dan juga memenuhi kebutuhan *human relationship, civic responsibility, economic competence dan thinking ability.*

Tujuan Pendidikan IPS dapat dicapai dengan baik manakala bahan pendidikan diorganisasikan secara bervariasi mulai dari pendekatan mono-struktur disiplin ilmu, interstruktur dan transtruktur disiplin ilmu-ilmu sosial, dengan Pancasila sebagai nilai sentralnya sesuai dengan tujuan institusional lembaga pendidikan.Secara umum, tujuan dari Ilmu Pengetahuan Sosial adalah membentuk siswa atau

pelajar menjadi warganegara yang bertanggungjawab, yang faham akan hak dan tanggungjawab kewajibannya.

C. Landasan Filosofis Ilmu Pengetahuan Sosial

Filsafat pendidikan IPS/IS menempati posisi penting dalam mengembangkan kurikulum dan demikian pula terhadap pengembangan kurikulum IPS/IS. Tanner dan Tanner (1980) mengemukakan pendapat mengenai posisi filsafat pendidikan dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut *"both a source and an influence for educational objectives and curriculum development*. Pendapat serupa dikemukakan oleh yang mengatakan bahwa: *Philosophy lies at the heart of educational endeavor. This is perhaps more evident in curriculum domain then in any other, for curriculum is a response to the question of how to live a good life…. Jhon dewey (1916) supported this emphasis when he suggested that education is the testing ground of philosophy itself.*[12]

Filosofi yang digunakan para pengembang kurikulum di Indonesia terbatas pada essensialisme dan perenialisme, disadari atau tidak disadari filosofi terus menerus digunakan dalam setiap perubahan kurikulum sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengembangan kurikulum selalu menghasilkan kurikulum yang sama. Perbedaan hanya terjadi dalam cara pengemasan konten kurikulum dan proses pembelajaran.

Pandangan filosofi essensialisme menekankan kurikulum sebagai media pendidikan untuk *" cultivation of the intellect, academic excellence"*. Pandangan yang mirip dianut oleh filosofi perenialisme yang menekankan pada *"cultivations of rational powers"* dan *" academic excellence"*. Pandangan filosofi menempatkan pendidikan IPS/IS sebagai pendidikan untuk mengembangkan intlektual dalam pengertian lama.

12 M. Nu'man Somantri, dkk, *Inovasi Pembelajaran IPS.* (Bandung: Rizqi Press).2010.hlm.10

Pendidikan IPS/IS harus mampu menggunakan berbagai filosofi sehingga berbagai dimensi intelektual peserta didik dapat dikembangkan dengan baik, mendekantkan dirinya dengan masyarakat sekitarnya, dan menyediakan masyarakat sekitar sebagai objek studi yang langsung dapat diamati.

Filsafat rekonstruksionisme dikemukakan pertama kali dikemukakan oleh Lester Frank Ward (1880) melalui bukunya *Dynamic Sociology* dan *The Psychic Factors of Civilization*. Ward menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dunia sosial dimana mereka hidup melalui penerapan intelegensi untuk mengatasi masalah. Selain itu, mengusulkan pendidikan yang dapat mengembangkan intelegensi yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk menciptakan tempat yang lebih pantas untuk hidup manusia. Rekonstruksionisme berisi dua premis utama yaitu: (1) Masyarakat membutuhkan rekonstruksi konstan atau perubahan, (2) perubahan sosial melibatkan rekonstruksi pendidikan dan menerapkannya dalam masyarakat. Rekonstruksionisme dapat dilihat sebagai perluasan terbaru dari pragmatisme. Rekonstruksionisme menganggap bahwa masyarakat sekarang ini berada dalam masalah karena revisi/perbaikan tidak sesuai seperti yang diinginkan.

Selanjutnya pada abad modern rekonstruksionisme dikembangkan oleh oleh George Count, Harold Rugg, dan Caroline Pratt pada tahun 1930 di Amerika Serikat dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Pada prinsipnya, aliran ini sepaham dengan aliran perenialisme yang menyatakan bahwa terjadinya krisis kebudayaan modern sekarang ini disebabkan karena adanya tatanan masyarakat yang tidak benar dalam konstruksinya yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran moral sosial dalam masyarakat. Karena itu pendidikan harus hadir untuk merombak dan

setelahnya berupaya untuk menyusun kembali tatanan tersebut sehingga terciptalah keteraturan dan kenyamanan. Pendidikan harus mampu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru, dengan melibatkan kerjasama antar ummat manusia.

Aliran ini berpijak pada pola pemikiran bahwa untuk memahami realita alam nyata memerlukan suatu asas tahu, dalam arti bahwa tidak mungkin memahami realita ini tanpa melalui proses pengalaman dan hubungan dengan realita terlebih dahulu melalui penemuan suatu pintu gerbang ilmu pengetahuan. Karenanya baik indra maupun rasio sama-sama berfungsi membentuk pengetahuan, dan akal di bawa oleh panca indra menjadi pengetahuan dalam yang sesungguhnya. Dari sudut pandang teologis, aliran rekonstruksionisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas super natural yakni menerima nilai natural yang universal, yang abadi berdasarkan prinsip nilai teologis. Hakikat manusia adalah pancaran yang potensial yang berasal dari dan dipimpin oleh Tuhan dan atas dasar inilah tinjauan tentang kebenaran dan keburukan dapat diketahui. Dan, dari sudut pandang ontologis aliran ini memandang bahwa realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada di mana dan sama di setiap tempat.

Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa. Karenanya pembinaan kembali daya inetelektual dan spiritual yang sehat akan membina kembali manusia melalui pendidikan yang tepat atas nilai dan norma yang benar pula demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Kemudian aliran ini memiliki persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur, diperintah oleh rakyat secara demokratis dan bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Sila-sila demokrasi yang sungguh bukan hanya leori tetapi mesti menjadi kenyataan,

sehingga dapat diwujudkan suatu dunia dengan potensi-potensi teknologi, mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran serta keamanan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, keturunan, nasionalisme, agama dan masyarakat bersangkutan.

Rekonstruksionisme berpendapat bahwa sekolah harus diarahkan kepada pencapaian tatanan demokrasi yang mendunia. Aliran filsafat ini menghendaki agar setiap individu dan kelompok tanpa mengabaikan nilai-nilai masa lalu, mampu mengembangkan pengetahuan, teori, atau pandangan tertentu yang paling relevan dengan kepentingan mereka melalui pemberdayaan peserta didik dalam proses pembelajaran guna memproduksi pengetahuan baru. Dalam pandangan aliran filsafat ini lebih menekankan agar siswa dalam pembelajaran mampu menemukan *(inquiry),* penemuan yang bersifat informasi baru bagi siswa berdasarkan bacaan yang ia lakukan. Pembelajaran lebih ditekankan pada proses bukan hasilnya. Aktivitas siswa menjadi perioritas utama dalam berlangsungnya pembelajaran.

Menurut M. Nu'man Somantri, dalam mengembangkan filsafat pendidikan di Indonesia yang berada dalam kondisi kemajemukan, maka perlu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan dan pola pikir rekonstruktionis (*A Restructured Philosophy of Education*). Pemilihan pendekatan rekonstruktionis tersebut berdasarkan alasan : (1) memungkinkan kita untuk mengambil kebaikan berbagai aliran filsafat pendidikan. (2) terbuka kemungkinan untuk menempatkan kebudayaan Nasional yang dilandasi keimanan. (3) bisa dijadikan ide sentral (central idea) bagi pembangunan pendidikan. (4) bisa dijadikan sebagai filsafat nilai (*philosophy of value*), dan (5) bisa dijadikan sebagai filsafat kritis (*philosophy of critism*).[13]

13 M. Nu'man Somantri. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS.* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).2001. hlm.60

Dengan pendekatan rekonstruktionis akan direkonstruksikan beberapa prinsip berikut: (1) Pendidikan harus mempunyai tujuan (perenialisme); (2) Kesinambungan pengalaman kebudayaan (essensialisme); 3) Proses perubahan budaya dimungkinkan oleh tindakan kecerdasaran berpikir reflektif (*intelligence of reflective thinking*) dan harus merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan proses perubahan social. Selanjutnya, adapun yang menjadi pokok-pokok pikiran rekonstruksionisme, yakni: (1) Pendidikan harus menciptakan tatanan sosial yang baru sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi sosial yang baru; (2) Masyarakat baru; (3) Anak, sekolah, dan pendidikan dipengaruhi oleh kekuatan sosial budaya; (4) Guru meyakinkan murid tentang kebenaran dan memecahkan masalah melalui rekonstruksi sosial secara demokratis; (5) Memperbarui tujuan dan cara-cara yang dipakai pendidikan.

Menurut aliran ini pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat sangat penting untuk membentuk kembali manusia atas nilai dan norma yang benar demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang,sehingga terbentuk alam dan dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Masa depan suatu bangsa sudah diatur, diperintah oleh rakyat secara demokratis sehingga perubahan-perubahan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik akan selalu diadakan dan dijadikan realita, dan bukan dunia yang dikuasai golongan tertentu, sehingga dapat diwujudkan suatu dunia dengan potensi-potensi teknologi, yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta keamanan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, keturunan, agama dan masyarakat yang bersangkutan, akan tetapi perubahan yang digunakan untuk kepentingan bersama.

IPS pada hakikatnya bukan merupakan suatu bidang atau disiplin keilmuan, melainkan lebih merupakan bidang kajian tentang gejala atau masalah sosial. Kerangka kerja kajiannya

adalah ilmu sosial, namun dalam rangka kerjanya lebih ditekankan kepada hal yang lebih praktis dalam mempelajari masalah sosial. Jadi pengetahuan sosial tidak terlalu bersifat akademis teoritis, namun merupakan pengetahuan praktis yang dapat diajarkan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Para filsuf rekonstruktivisme mempunyai sikap terhadap perubahan tersebut bahwa mereka mendukung individu untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan pada saat ini. Aliran filsafat rekonstruktivisme dapat menjadi alat yang responsif karena saat ini kita dihadapkan pada sejumlah permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan ras, kemiskinan, peperangan, kerusakan lingkungan dan teknologi yang tidak manusiawi yang membutuhkan rekonstruksi atau perubahan dengan segera. Individu di abad 21 kebingungan tidak hanya oleh perubahan yang telah terjadi, tetapi juga dengan kemungkinan perubahan pada masa yang akan datang yang harus dibuat jika kita hendak mengatasi masalah-masalah yang ada. Sedangkan ada banyak orang pintar dan mempunyai pandangan yang berpikir dan menegembangkan tentang perubahan sosial yang belakangan ini disebut dengan filsafat rekonstruktivisme.

Hasan menjelaskan: Revitalisasi Pendidikan IPS menempatkan dirinya sebagai pendidikan yang memiliki tugas untuk mengembangkan dimensi inteligens itu dan untuk itu harus berani menngubah filosofi yang dianut selama ini menjadi filosofi eklektik yang didalamnya terdapat pandangan esensialisme dan perenialisme berkenaaan dengan kemampuan intelektual logika-matematika, eksperimentalisme berkenaan dengan inteligensi sosial, warga yang demokratik dan rekonstruksi sosial, ilmu-ilmu sosial

diajarkan agar bermanfaat untuk dilaksanakan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.[14]

Sedangkan landasan filosofis pembelajaran IPS yaitu filsafat Perenialisme. Perenialisme memandang pendidikan sebagai proses penting dalam pewarisan nilai kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat harus ditransformasikan dalam pendidikan, sehingga diketahui, diterima, dan dapat dihayati oleh peserta didik. Perenialisme memandang bahwa nilai yang lahir pada masa lalu adalah hal berharga untuk diwariskan kepada generasi muda.

14 Hasan, H. S., *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Ditjen Pendidikan tinggi Depdikbud). 1996. hlm.14

B A B

2

KULTUR AKADEMIK PENDIDIKAN IPS

A. Sejarah Perkembangan IPS

Istilah *social studies* pertama kali dipakai di Amerika pada tahun 1913 untuk merumuskan dan membina kurikulum sekolah pada mata pelajaran sejarah dan geografi. Pada tahun 1921 di Washington dibentuk *National Council for the Social Studies.* Harapan masyarakat dterhadap *social studies* dalam dunia Pendidikan adalah untuk memberikan bekal kepada siswa agar dapat beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang pluralistis dan kompleks. Kemudian pada tahun 1935, tepatnya 20-30 November diadakan pertemuan organisasi pertama kali. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kurikulum *social studies* pada dasarnya bersandar pada ilmu-ilmu sosial.[15]

Periode berikutnya, pada tahun 1940-1950an *social studies* seolah-olah mendapat guncangan terutama dari kelompok

15 M. Nu'man Somantri. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS.* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).2001. hlm. 54.

ilmu sejarah, ekonomi, geografi, dan ahli ilmu sosial lainnya. Beberapa nama tokoh yang berpengaruh seperti: Bruce Frazee (seorang professor pendidikan pada Universitas Trinity dan koordinator *national core knowledge*), Jemis Leing (seorang mantan presiden *social science education consortium*), dan Diane Ravitch (professor riset pendidikan pada Universitas New York), semuanya terlibat dalam kritik keras terhadap dilanjutkannya pengembangan kurikulum pembelajaran *Social Studies* di sekolah-sekolah. Bahkan, seorang professor bernama Francis Desales ingin tetap mengembangkan keilmuan masing-masing ilmu sosial tanpa pengupayaan korelasi, apalagi integrasi dalam suatu kurikulum pendidikan di Amerika Serikat hal ini jelas sebagaimana dalam tulisan *"what's wrong with social studies education*?" (Desales, 2003), dikemukakan bahwa *the federal government recently refused to fund programs to improve social studies education and, nationally, efforts are increasing to replace social studies in the school curriculu with history and the social sciences.*[16]

Pada tahun 1955 ada perkembangan baru dalam kurikulum *Social Studies* di Amerika Serikat karena persaingan terknologi dengan negara adikuasa (Rusia) dengan memperhatikan segala bentuk interaksi di kelas melalui kurikulum *Social Studies* agar pelajaran *Social Studies* bukan menjadi pelajaran yang tabu di kalangan para siswa.

Tahun 1960-an telah timbul suatu gerakan akademis yang mendasar di Amerika Serikat, yang secara khusus dapat dipandang sebagai suatu gerakan revolusi dalam *social studies* yang diplopori oleh para sejarawan dan ilmuan sosial lainnya. Dalam kondisi dinamis, kelompok ilmuan ini tampaknya begitu antusias tertarik terhadap *social studies*, hal ini ditunjang oleh pemerintah federal yang menyediakan dana memadai untuk pengembangan proyek kurikulum baru, maka para

16 Ibid, hlm. 55

ahli tersebut untuk memperoleh suatu produk pembaharuan pendidikan apa yang disebut dengan *new social* sebenarnya, akar sejarah *social studies* di Amerika Serikat, dibuktikan dengan dipublikasikannya karya akademis oleh *national council for the social studies* (NCSS). Dan pada tahun 1967, masyarakat mulai memberikan perhatian yang besar terhadap kurikulum *social studies* dengan harapan agar anak-anak atau generasi mengetahui tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat akan hak dan kewajibannya terhadap pluralisme yang kompleks di negara mereka.

Pada tahun 1970-an kehadiran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di tengah-tengah dunia pendidikan kita, jelas dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pembaharuan pendidikan di Amerika Serikat, ketika IPS sering dihubungkan dengan gerakan-gerakan *The New Social Studies* pada Tahun 1970-an.[17] Jika demikian apa pengertian *social studies* atau *new social studies* itu?. Edwin fenton yang dipandang salah seorang pelopor the *new social studies* mengemukakan: *no single eleent of the new social studies is really new: each element has an ancient lineage, at least in theory* (Fenton, 1966: V). Jadi, *the new social studies* di sini menegaskan kembali bahwa hal itu bukan segala-galanya baru. Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa yang baru itu adalah pembaharuan dalam pembelajarannya *social studies* tersebut. Sebagaimana ia katakan: *it will involve three clusters of objectives; attitudes and values, the use of ode of inquiry involving the development and validation of hypothesis, and variety of knowledge objectives* (Fanton, 1966)

Dengan demikian, *new social studies* menegaskan kembali tujuan pendidikan dan pembelajaran yang menimbulkan implikasi terhadap pemilihan metode maupun strategi pembelajarannya. Ketiga tujuan *social studies* tersebut, jika dikategorikan menurut *taxonomy bloom*, antara lain: *cognitive,*

17 M. Nu'man Somantri. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS.* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).2001. hlm.43-47

affective, dan *psychomotor*. Usul perubahan materi pelajaran tersebut didasarkan pada tiga kriteria, yakni: (1) kebutuhan dan minat anak; (2) masalah-masalah sosial kontemporer; (3) materi ilmu pengetahuan yang penting dan relevan yang diambil dari ilmu-ilmu sosial.

Timbulnya gerakan akademis tahun 1960 menjadi suatu dasar munculnya gerakan revolusi IPS di Amerika Serikat, yang dipelopori oleh para sejarawan dan ilmuwan sosial lainnya. Dalam kondisi dinamis, kelompok ilmuwan ini tampaknya begitu antusias tertarik terhadap IPS. Hal ini ditunjang oleh pemerintah federal yang menyediakan dana memadai untuk pengembangan proyek kurikulum baru, maka para ahli tersebut dapat bekerja sama dalam mewujudkan gerakan pendidikan tersebut untuk memperoleh suatu produk pembaruan pendidikan yang disebut dengan *The New social studies*.

IPS di Amerika Serikat atau yang dikenal dengan *Social Studies* pertama kali dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Akar sejarah IPS di Amerika Serikat dibuktikan dengan dipublikasikannya karya akademis oleh *National Council for the Social Studies* (NCSS). Pertemuan organisasi tersebut pertama kali dilak-sanakan pada tanggal 20-30 November 1935. Dalam pertemuan tersebut di-sepakati bahwa kurikulum IPS pada dasar-nya bersandar pada ilmu ilmu sosial. Sebelum membahas tentang perkembangan *Social Science* (IPS) terlebih dahulu mengenal latar belakang lahirnya IPS dalam dunia akademis.

Jarolimek (1977) mengisyaratkan bahwa mata pelajaran *Social Studies* lebih bersifat praktis. Maksudnya adalah agar siswa memiliki kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi fisik dan sosial dalam menciptakan kehidupan

yang seimbang serta mampu memecahkan masalah sosial dan memiliki keyakinan untuk masa depan. Jadi dengan hadirnya social studies di Amerika Serikat, maka *out put* Pendidikan yang diharapkan adalah menjadikan manusia yang kritis, *future oriented* dan mampu mengatasi masalah-masalah social yang muncul.[18]

B. Sejarah Perkembangan IPS di Indonesia

Latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia juga hampir sama dengan dibeberapa negara lain, di antaranya situasi kacau dan pertentangan politik bangsa, kondisi keragaman budaya bangsa (multikultur) yang sangat rentan terjadinya konflik. Sehingga, sebagai akibat konflik dan situasi nasional bangsa yang tidak stabil, terlebih adanya pemberontakan G30S/ PKI dan berbagai masalah nasional lainnya di pandang perlu memasukan program pendidikan sebagai propaganda dan penanaman nilai-nilai sosial budaya masyarakat, berbangsa dan bernegara ke dalam kurikulum sekolah.

Oleh karenanya, dalam beberapa pertemuan ilmiah dibahas Istilah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) sebagai program pendidikan tingkat sekolah di Indonesia, dan pertama kali muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu Solo Jawa Tengah. Dalam laporan seminar tersebut, muncul 3 istilah dan digunakan secara bertukar pakai, yaitu :[19]

1. Pengetahuan Sosial
2. Studi Sosial

---

18 Jarolimek, J. *Social Studies in Elementary Education, Seventh Edition*. (New York: Macmillan Publishing Co.) 2002. hlm.24

19 Yuni Milatusshotikha.*"Ilmu Pengetahuan Sosial"* dalam http://yunimilatussholikha.blogspot.com/2014/12/1_2.html diakses pada 21 Januari 2020

3. Ilmu Pengetahuan Sosial

Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dunia persekolahan di Indonesia pada tahun 1972-1973 yang diujicobakan dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Kemudian secara resmi dalam kurikulum 1975 program pendidikan tentang masalah sosial dipandang tidak cukup diajarkan melalui pelajaran sejarah dan geografi saja, maka dilakukan reduksi mata pelajaran di tingkat SD-SMA untuk beberapa mata pelajaran ilmu sosial yang serumpun digabung ke dalam mata pelajaran IPS. Oleh karena itu, pemberlakuan istilah IPS (*social studies*) dalam kurikulum 1975 tersebut, dapat dikatakan sebagai kelahiran IPS secara resmi di Indonesia.

IPS secara formal dimasukkan menjadi standar pendidikan nasional tahun 1975 dalam kurikulum 1975. Sebelumnya, pembelajaran ilmu-ilmu sosial untuk tingkat persekolahan menggunakan istilah yang berubah-ubah sesuai dengan situasi politik pada masa itu. Misalnya, Kurikulum 1964 menggunakan istilah Pendidikan Kemasyarakatan. Ada dua kelompok mata pelajaran, ialah kelompok dasar yang terdiri dari Sejarah Indonesia dan Geografi Indonesia, Bahasa Indonesia dan *Civics* dan kelompok cipta yang terdiri atas Sejarah Dunia dan Geografi Dunia.[20]

Pada tahun 1968, terjadi perubahan pengelompokan mata pelajaran sebagai akibat dari perubahan orientasi pendidikan. Mata pelajaran disekolah dibedakan menjadi pendidikan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Kurikulum 1964 berubah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarga negaraan.

---

20 Sapriya. *Pendidikan IPS "Konsep dan Pembelajaran"*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). 2009. hlm.77

Sehingga pada tahun 1975, lahirlah kurikulum 1975 yang mengelompokkan tiga jenis pendidikan, yakni pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keahlian khusus. Dalam kurikulum 1975 dikemukakan secara ekspilisit istilah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang merupakan fusi (Perpaduan) dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi. Selain mata pelajaran IPS, pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri ialah Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dalam kurikulum 1975, IPS termasuk kelompok pendidikan akademis sedangkan PMP termasuk pendidikan umum. Namun IPS sebagai pendidikan akademis mempunyai misi menyampaikan nilai-nilai bedasarkan filsafat Pancasila dan UUD 1945.

Konsep pendidikan IPS seperti itu tetap dipertahankan dalam Kurikulum 1984 yang secara konseptual merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 khususnya dalam aktualisasi materi, seperti masuknya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai materi pokok PMP. Dalam Kurikulum 1984, PPKn merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti semua siswa di SD, SMP dan SMU. Sedangkan mata pelajaran IPS diwujudkan dalam:[21]

1. Pendidikan IPS terpadu di SD kelas I-VI.
2. Pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup geografi, sejarah dan ekonomi koperasi.
3. Pendidikan IPS terpisah di SMU yang meliputi Sejarah Nasional dan Sejarah Umum di kelas I-II; Ekonomi dan Geografi di kelas I-II; Sejarah Budaya di kelas III program IPS.

Dimensi konseptual mengenai pendidikan IPS telah berulang kali dibahas dalam rangkaian pertemuan ilmiah,

21 Yuni Milatusshotikha. *Ilmu Pengetahuan Sosial"* dalam http://yunimilatussholikha.blogspot.com/2014/12/1_2.html diakses pada 21 Januari 2020

yakni pertemuan HISPISI (Himpunan Sarjana Pendididkan Ilmu Sosial) pertama di Bandung tahun 1989, Forum Komunikasi Pimpinan HIPS di Yogyakarta tahun 1991, di Padang tahun 1992, di Ujung Pandang tahun 1993, Konvensi Pendidikan kedua di Medan tahun 1992. Salah satu materi yang selalu menjadi agenda pembahasan ialah mengenai konsep PIPS. Dalam pertemuan Ujung Pandang, M. Nu'man Soemantri, pakar dan ketua HISPISI menegaskan adanya dua versi PIPS sebagaimana dirumuskan dalam pertemuan di Yogyakarta, yaitu:[22]

1. Versi PIPS untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. PIPS adalah penyederhanaan, adaptasi dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang duorganisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/ psikologis untuk tujuan pendidikan.
2. Versi PIPS untuk Jurusan Pendidikan IPS-IKIP. PIPS adalah seleksi dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.

Dalam perjalanannya kurikulum 1975, didalam upaya perbaikan kurikulum IPS 1975 (Kurikulum Yang Disempurnakan (KYD) 1975) baru terwujud pada tahun 1984. Kurikulum IPS 1984 pada hakikatnya menyempurnakan atau memperbaiki kelemahan-kelamahan Kurikulum 1975. Ditinjau dari segi pendekatan (metodologi) pembelajaran, Kurikulum IPS 1975 dan 1984 menggunakan pendekatan integratif dan struktural untuk IPS SMP dan pendekatan disiplin terpisah (*separated disciplinary approach*) untuk SMA.[23]

Kurikulum 1994 dilaksanakan secara bertahap mulai ajaran 1994-1995 merupakan pembenahan atas pelaksanaan kurikulum 1984 setelah memperhatikan tuntutan

22 *Ibid.*

23 Ibid. hlm 78

perkembangan dan keadaan masyarakat saat itu, khususnya yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, kebutuhan pembangunan dan gencarnya arus globalisasi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 1984 itu sendiri. Upaya pembaharuan kurikulum pendidikan nampak saat diadakannya serangkaian Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 1986 sampai 1989.

Pembenahan kurikulum ini juga didorong oleh amanat GBHN 1988 yang intinya;

1. Perlunya diteruskan upaya peningkatan mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan
2. Perlunya persiapan perluasan wajib belajar pendidikan dasar dari enam tahun menjadi sembilan tahun
3. Perlunya segera dilahirkan undang-undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada tahun 1994, terjadi lagi perubahan kurikulum IPS. dalam Kurikulum 1994 dinyatakan bahwa IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah. Untuk IPS SD, bahan kajian pokok dibedakan atas dua bagian, ialah pengetahuan sosial dan sejarah. Bahan kajian pengetahuan sosial meliputi lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, dan pemerintahan, sedangkan bahan kajian sejarah mencangkup perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga kini.

Memasuki Abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan khususnya perubahan bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem endidikan di Indonesia. Pada tahun 2003 disahkan UNdang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia.[24]

Dalam Pasal 37 UU Sisdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum dan pendidikan dasar dan menengah. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut adalah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa standar nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidkan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, adanya standar nasional pendidikan telah berimplikasi terhadap sejumlah kebijakan bidang pendidikan yang lebih rendahnya.

Ketentuan tentang implikasi dari perundangan tersebut adalah dikeluarkannya kebijakan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) beserta pedomannya dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan panduan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

C. Latar Belakang Terbentuknya IPS

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya IPS berdasarkan pengalaman beberapa negara dalam memasukkan IPS ke dalam kurikulum pendidikan, diantaranya :

24 *Ibid*. hlm 79

1. Latar belakang Sosiologis

Tinjauan sosiologis ini pertama kali difokuskan pada tempat lahirnya dan pertama kali digunakan dalam kurikulum sekolah Rugby di Inggris tahun 1827. Thomas Arnold adalah orang yang pertama kali memasukkan IPS (*Social studies*) ke dalam kurikulum sekolah. Ia memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolah karena kondisi masyarakat Inggris yang mengalami kekacauan akibat revolusi industri yang melanda Inggris saat itu, yang terancam dekadensi, karena mekanisasi industri yang menimbulkan kesulitan bagi masyarakat Inggris terutama masyarakat buruh yang kurang mendapat perhatian dari kaum kapitalis dan pemerintah.

2. Latar belakang Pedagogis

Lahirnya IPS di Inggris, Amerika dan Indonesia selain sebagai reaksi atas keadaan masyarakat, juga dilatr belakangi oleh keinginan ketiga negara tersebut untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan yang di Amerika, perkembangan *Social Studies* dilatar belakangi oleh keinginanan para ilmuan untuk mencari Pendidikan dengan pola baru yang menghargai perbedaan atau menerima multi etnis pasca perang budak (perang saudara antara kubu utara dan selatan). Atas dasar itulah *Social Studies* dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin tahun 1892.

Social studies dalam istilah Indonesia disebut Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dalam proses eksistensinya terdapat dalam *"The National Herbart Society papers of* 1896 –1897" menegaskan, bahwa *social studies* sebagai *delimiting the social sciences for pedagogical use* (upaya membatasi ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan pedagogik/mendidik). Dengan hadirnya *social studies* masuk pada kurikulum di

sekolah, ada juga dibeberapa negara bagian di Amerika Serikat dan di Inggris untuk mengembangkan program pendidikan ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah. Pengertian ini juga dipakai sebagai dasar dalam dokumen *"Statement of the Chairman of Commite on Social Studies "* yang dikeluarkan oleh *Comittee on Social Studies* (CSS) tahun 1913.

Beberapa faktor penyebab munculnya Ilmu Pendidikan IPS *(social studies)* dalam dunia pendidikan di antaranya;

1. Adanya penyederhanaan ilmu-ilmu sosial untuk tujuan Pendidikan
2. Tarik menarik antara dua visi social studies; 1) Gerakan untuk mengintegrasikan disiplin ilmu social, 2) Gerakan pemisahan disiplin ilmu *sosial* yang cenderung memperlemah konsepsi *social studies education*.
3. Diharapkan ilmu-ilmu tentang *social studies* terpisah tidak terpadu. Karena masalah-masalah yang dihadapi beda-beda. Misalnya issu tentang sex, patriotisme dan ras.
4. *Social studies* merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu
5. Esensial *social studies* (IPS) mengandung visi, misi dan strategi pendidikan *social studies* yang mengokohkan pemikiran yang lebih solid dan kohesif
6. Rambu-rambu yang digariskan NCSS tahun 1994 dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi baru social studies
7. Sejarah Perkembangan IPS di Indonesia IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) pertama kali muncul dalam Seminar Nasional tentang *Civic Education* tahun 1972 di Tawangmangu Solo Jawa Tengah. Dalam laporan seminar tersebut, muncul 3 istilah dan digunakan secara bertukar pakai, yaitu Pengetahuan Sosial, Studi Sosial dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

8. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 – 1973, yakni dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah "Pendidikan Kewarganegaraan Negara/ Studi Sosial" Sebagai mata pelajaran social terpadu.
9. Pada tahap kurikulum PPSP konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk, yakni (Pendidikan IPS, terintegrasi dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara/ Studi Sosial, Pendidikan IPS terpisah, di mana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep payung untuk mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi, dan Pendidikan Kewargaan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus)

Dalam pada itu M. Nu'man Somantri mengenal IPS, kita dapat menangkap buah pikirannya, antara lain bahwa ciri-ciri studi social terlihat dari cara pengorganisasian bahan pelajaran yang menekankan kepada *scientific* dan psikologis. Segera dapat ditangkap bahwa *social studies* harus tetap memelihara unsur keilmuannya sementara sebagai problem pembelajaran harus diorgaisasikan sedemikian rupa sehingga cukup memperlihatkan tingkat perkembangan peserta didik. Tokoh IPS lainnya, A. Kosasih Djahiri merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktif untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat perskolahan.[25]

Dalam batasan ini ia mengemukakan tiga hal, yakni: (1) Seolah-olah menurutnya IPS adalah ilmu; (2) IPS sebagai ilmu ditampilkan dalam bentuk panduan (fusi) dengan konsep-konsep pilihan; (3) bahan-bahan IPS diorganisasikan

---

25 Djahiri, K. A., (1985). *StrategiPengajaranAfektifNilai Moral VCT dan Games dalam VCT*, (Bandung: Gramedia.).1985. hlm.2

sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai program pembelajaran.

Setelah kita meninjau sedikit pandangan-pandangan para ahli di Amerika Serikat, marilah kita telaah pendapat para tokoh IPS di lingkungan IKIP Bandung (UPI sekarang). Pertama-tama kita ikuti pandangan Achmad Sanusi. Menurut pendapatnya studi social adalah pembahasan yang analisis-interdisipliner mengenai masalah-masalah sosial yang terpilih, empiris dan kontenporer. Menilik batasan tersebut terdapat kesan bahwa studi social adalah pengkajian ilmiah dengan pendekatan interdisipliner terhadap problem-problem kemasyarakatan yang *meaningful*.

Sejarah perkembangan IPS dapat kita bagi ke dalam tiga fase:

1. Fase Diskursus

Istilah yang digunakan dalam bidang ini adalah *social studies* yang kemudian istilah tersebut juga digunakan menjadi nama sebuah lembaga yang bernama *Committee of Social Studies* (CSS) pada tahun 1913. Pada fase ini sekitar tahun 1935, terjadi diskursus para intelektual di Amerika Serikat terkait pertumbuhan dan tantangan agar *social studies* dapat menjadi suatu disiplin ilmu yang solid. Pada tahun 1940-1950, *National Council for The Social Studies* (NCSS) memunculkan sikap penekanan terhadap fakta-fakta sejarah dan budaya sebagai bagian hasil diskursus yang terjadi terhadap perlu tidaknya anak remaja bersikap demokratis dan kritis. Pada titik ini, ada dua diskursus tentang *social studies*, yaitu *citizenship education* atau *social studies education*. Diskursus ini terjadi dikarekanan adanya dua pihak yang mempunyai pandangan berbeda terhadap visi *social studies*.

Gambar 1.1 Logo NCSS

Pada rentang tahun 1940 sampai dengan 1960an, ada dua gerakan terhadap visi *social studies*, yang pertama adalah gerakan mengintegrasikan disiplin ilmu-ilmu sosial dan yang ke dua gerakan untuk bertahan pada masing- masing disiplin ilmu sosial. Sekitar tahun 1955 terobosan besar dilakukan oleh Maurice Hunt dan Lawrence Metcalft yang berusaha mengintegrasikan antara *citizenship education* dan *social studies education*, dengan membuka sudut pandang baru terhadap hal yang bersifat *closed area* atau istilah yang masih tabu di masyarakat menjadi *open area* dalam konteks refleksi rasional dalam upaya agar siswa dapat mengambil sikap dan keputusan terhadap permasalah publik (*reflectif thinking & critical thinking*).

Pada tahun 1960-an, muncul gerakan akademis yang memunculkan istilah *the new social studies*, diprakarsai oleh sejarawan dan ahli ilmu sosial dalam usaha mengembangkan kurikulum dan bahan ajar yang inovatif dan berskala besar, namun gerakan ini belum berhasil sampai tahun 1970-an, namun perlu ditekankan, gerakan ini berhasil meningkatkan *social studies* ke *higher level of intellectual pursuit* yang melahirkan era pembelajaran *social science education*, walaupun secara substantif belum efektif dalam perubahan sikap siswa, dalam hal ini adalah sikap demokratis.

Pada era pembelajaran *social science education*, para ahli ilmu sosial dan sejarah banyak terpengaruh pemikiran Jerome Bruner yang mengatakan *"any subject can be taught effectively in some intellectually honest form to any child at any stage of development*.[26] Dalam pernyataan diatas bahwa setiap *subject* (materi) dapat diajarkan pada tingkat usia anak.

Pada akhirnya, mereka bersepakat untuk mengembangkan *social studies* dengan perspektif dari Jerome Bruner yang meyakini semua teori dapat diajarkan kepada semua tingkatan usia anak. Akan tetapi, pendapat Jerome Bruner dirasa sulit diterapkan di lapangan, walaupun mereka sudah bekerjasama dengan para pendidik dan ahli psikologi dalam mengembangkannya, akan tetapi pada akhirnya pendapat tersebut kembali memunculkan gerakan agar disiplin ilmu sosial diajarkan secara mandiri.

Kemudian konsorsium para ahli ilmu-ilmu sosial yang bernama *The Social Science Education Consortium*, menghasilkan dan menerbitkan sebuah buku berjudul *Concept and Structures in The New Social Studies Curriculum*. Mereka para ahli tersebut bersepakat tentang *the fundamental concepts and generalizations of a discipline, and the methods, procedures, and models necessary to develop and revise these fundamentals"*. Pendapat tersebut meyakini bahwa struktur disiplin akademis memiliki dua komponen yang menjadi rancangan bahan belajar *social studies* pada pembelajaran di sekolah, yaitu untuk menguasi konsep dan penggunaan metode inkuiri pada materi sejarah dan ilmu-ilmu sosial untuk menggeneralisasi pengetahuan[27].

Tahun 1994, para Dewan *National Council for The Social Studies* (NCSS) menerbitkan sebuah dokumen yang bernama *Expextations of Excellence: Curriculum Standar for the Social*

---

26 Barr, R.D, Barth, J.L, Shermis, S.S.*Definiting the social studies*.(Washington DC: NCSS).1977.hlm 26

27 Barr, R.D, Barth, J.L, Shermis, S.S. *Definiting the social studies* .(Washington DC: NCSS). 1977. hlm 21.

Studies, yang kemudian menjadi dasar perkembangan *social studies* di USA khususnya sampai sekarang. Dalam dokumen tersebut, dinyatakan bahwa penekanan *social studies* pada tingkat Pendidikan terhadap keterpaduan *knowledge, skills, and attitudes within and across dicipliner*, dan pada kelas rendah dibangun berdasarkan tema-tema tertentu.

2. Fase Interaksi

Program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I tahun 1969-1974 tim ahli dalam rumusan Pendidikan Nasional menemukan 5 problem:

1. Kuantitas. Kuantitas yang berarti terkait dengan permasalahan perluasan dan pemerataan kesempatan semua warga untuk mendapatkan akses Pendidikan dan belajar;
2. Kualitas. Kualitas yang berarti permasalahan pada mutu lulusan dan bagaimana meningkatkannya;
3. Relevansi. Relevansi yang berarti adanya keselarasan antara sistem pada Pendidikan dengan kebutuhan pada pembangunan;
4. Efektifitas. Efektifitas yang berarti bagaima sistem pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, agar kuantitas, kualitas, dan relevansi bisa berjalan dan tercapai;
5. Kaderirasi. Pembinaan generasi muda dalam rangka menyiapkan tenaga produktif bagi kepentingan pembangunan nasional.

Selain itu, ramainya diskursus terhadap *social studies* yang terjadi di USA, berimbas kepada munculnya gerakan dan pemikiran para ahli Pendidikan di Indonesia tentang urgensi *social studies* pada kurikulum Pendidikan di Indonesia. Pada Seminar Nasional di Tawamangu tahun 1972, istilah

IPS muncul pertama kali dan menjadi wacana yang menghasilkan beberapa istilah yaitu:

a. Pengetahuan Sosial (*Social Science*);

b. Studi Sosial (*Social Studies*);

c. Ilmu Pengetahuan Sosial (*Social Science Education*).

c. Fase Perkembangan

Fase ini lebih menekankan penerapan mata pelajaran IPS di kurikulum Indonesia dari tahun ke tahun sampai dengan kurikulum 2013 sebagai *the new curriculum*. Pada tahun 1972-1973, IPS pertama kali diujicobakan pada Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PSSP) IKIP Bandung. Pada tahun 1975, IPS yang pada awalnya mencakup sejarah dan geografi dirasa tidak efektif dalam membentuk sikap kritis dan sosial siswa, sehingga perlu adanya reduksi mata pelajaran ilmu-ilmu sosial yang serumpun, dintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPS sehingga menjadi terpadu. Pada kurikulum 1975 secara resmi dapat dikatakan sebagai kelahiran IPS pada kurikulum Indonesia. Pada kurikulum 1975 konsep Pendidikan IPS menampilkan 4 profil yaitu:

1. Pendidikan IPS Khusus, yaitu Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menggantikan mata pelajaran Kewargaan Negara.
2. Pendidikan IPS terpadu untuk tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
3. Pendidikan IPS untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMA) sebagai konfederasi Sejarah, Geografi, dan Ekonomi Koperasi.
4. Pendidikan IPS untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diajarkan berdasarkan disiplin ilmu-ilmu sosial seperti Sejarah dan Geografi untuk Sekolah Pendidikan

Guru (SPG), Ekonomi dan Sejarah untuk tingkat SMEA/ SMK.

Pada kurikulum 1984 sampai dengan kurikulum 2013 IPS secara konseptual tetap pada penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial untuk tujuan paedagogis, dan pada kurikulum terbaru IPS hanya disajikan pada kelas 4-6 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah secara tematik terpadu.

Perkembangan setatus pendidikan ilmu-ilmu social yang ada di Indonesia. Perkembangan tersebut dilihat dari perkembangan kurikulum pendidikan ilmu-ilmu social untuk SMP dan SMA sejak kurikulum 1964 sampai dengan 1994. Kedua unit pendidikan ini dipilih karena keduannya adalah sekolah untuk pendidikan yang masih bersifat umum dan setatus pendidikan ilmu-ilmu social paling jelas terlihat pada kurikulum kedua sekolah tersebut. Dalam kurikulum sekolah kejuruan dan keguruan setatus kurikulum pendidikan ilmu-ilmu social sukar dijadikan indicator perkembangan pendidikan ilmu-ilmu sosial.

Perkembangan status tersebut dikaji berdasarkan posisi kulikuler disiplin ilmu-ilmu social yang ada di kurikulum, tujuan ilmu-ilmu social yang akan dicapai serta ruang lingkup disiplin ilmu-ilmu social yang dijadikan meteri kurikulum. Berdasarkan posisi, tujuan, dan ruang lingkup pendidikan ilmu-ilmu social tersebut dalam kurikulum kajian dilanjutkan dengan melihat kosekuensi dari ketiga hal itu terhadap pendidikan ilmu-ilmu social.

Dengan bahasan semacam ini diharapkan akan terlihat perkembangan status pendidikan ilmu-ilmu social di Indonesia dalam masa 30 tahun terakhir ini. Kedudukan masyarakat sebagai pemakai dan menuntut pendidikan (*pressure group*) menyebabkan pengembangan kurikulum akan memberikan perhatian terhadap apa yang diperlukan masyarakat. Oleh karena itu memlalui kajian mengenai perkembangan

pendidikan ilmu-ilmu sosial selama 30 tahun terakhir ini pemahaman mengenai pendidikan ilmu social menjadi semakin baik.

Paradigma Pendidikan IPS di Indonesia tidak boleh terhegemoni atau tersubordinasi oleh paradigma orientasi barat. Konteks social masyarakat di barat dan Indonesia yang berbeda karakter membuat corak Pendidikan IPS seharusnya memang tidak sama (Abu Su'ud, 2008). Masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai social budaya yang dianut dan diinternalisasikan kepada generasi Indonesia menjadi karakter dan budaya yang akan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Zuchdi (2010) mencoba menggagas pendidikan karakter berbasis Ke-Indonesiaan yakni karakter Pancasila untuk dapat di internalisasikan ke dalam segala mata pelajaran di sekolah. Peserta didik harus dikenalkan dengan nilai-nilai humanitas (universal) moral sejak dini mungkin. Jati diri pendidikan IPS adalah kerjasama ilmu pendidikan dengan disiplin ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan, yaitu adanya seperangkat kemampuan: (a) memilih (menyederhanakan) bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humanities untuk tujuan pendidikan; (b) mengorganisasikan bahan pendidikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan; (c) menyajikan metode pendidikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan; (d) menilai hasil belajar pendidikan IPS. Oleh karena itu kajian pendidikan IPS haruslah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kajian filsafat ilmu IPS.[28]

28 M. Nu'man Somantri. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).2001. hlm.64

B A B

3

FAKTA, KONSEP, TEORI DAN GENERALISASI

A. Fakta

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal atau kejadian yang sering kita jumpai yang sifatnya factual atau nyata, positif atau negative, diterima atau ditolak, konfortasi ataupun penyimpangan. Seperti halnya tanggal 21-22 Mei 1998 telah terjadi kerusuhan yang dipicu oleh politik.

Peristiwa atau kejadian yang telah diuji dan diketahui kebenarannya disebut fakta, karena diperoleh dari hasil observasi yang bisa dibuktikan kebenarannya secara empiris dan real. Menurut Banks fakta merupakan pernyataan positif dan rumusan yang sederhana.[29]

Dalam disiplin ilmu fakta memiliki kedudukkan yang mendasar. Fakta menjadi sesuatu penopang untuk menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan

29 Banks, J. A. (1990). *Teaching Strategies for The Social Studies.* (New York: Longman). 1990. hlm. 85

teori. Dapat dikatakan bahwa disiplin ilmu tidak akan berkembang tanpa fakta. Kesimpulan pertama dalam proses berfikir keilmuan adalah untuk menghasilkan fakta.

Oleh karena itu, Schuncke (1988) mengatakan bahwa fakta adalah *building blocks* yang digunakan untuk mengembangkan konsep dan generalisasi. Tanpa fakta tidak akan ada konsep dan tanpa konsep tidak akan ada generalisasi dan selanjutnya tidak akan ada teori.[30]

Schuncke (1988) menggambarkan keterhubungan antara fakta, konsep, dan generalisasi sebagai berikut:

Keterhubungan Fakta, Konsep, dan Generalisasi

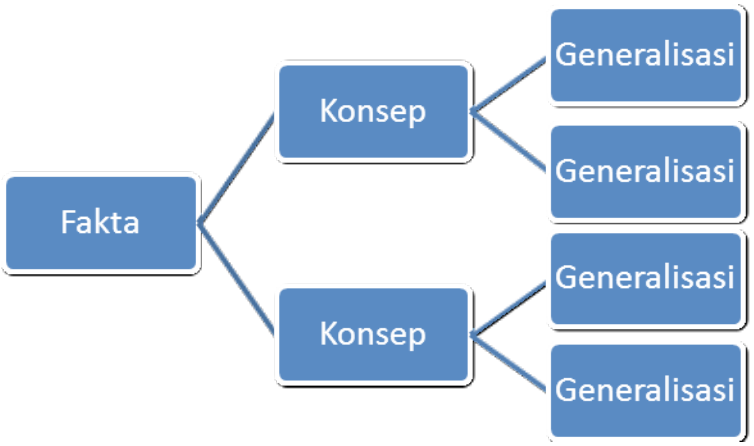

Penyederhanaan tersebut dilakukan untuk lebih jelas memperlihatkan betapa pentingnya fakta. Fakta adalah dasar dari pengetahuan yang dikembangkan manusia. Tanpa fakta disiplin ilmu-ilmu sosial tidak akan memiliki konsep. sedangkan seperti diketahui umum bahwa konsep adalah sesuatu yang sangat pokok dan menjadi kepedulian utama dalam ilmu-ilmu sosial. Para ilmuan hanya dapat mengumpulkan data

30 Prof. Dr. S. Hamid Hasan. *Pendidikan Ilmu Sosia.* (Jakarta: Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik). 1996. hlm.135.

atau informasi dari lapangan. Data atau informasi itu yang kemudian diolah berdasarkan prosedur tertentu untuk menghasilkan fakta. Jadi, fakta dihasilkan berdasarkan proses pengolahan tertentu dan atas pandangan tertentu.

Apabila seseorang melakukan penelitian maka yang dikumpulkan dari lapangan adalah data atau sering juga disebut dengan istilah informasi. Data ini yang tersedia di lapangan yang dapat dilihat, didengar, dikumpulkan dari sumber. Data itu kemudian diolah dan hasil olahan itu menghasilkan fakta. Fakta-fakta ini diperlukan untuk menentukan mana yang masuk atribut mana. Atribut-atribut tersebut yang membentuk suatu konsep. Konsep dirangkai dalam suatu hipotesis, kemudian dikembangkan menjadi generalisasi. Sifat rangkaian/hubungan antar konsep tersebut dapat berupa hubungan korelatif, kausatif, atau pun kontributif. Fakta untuk setiap disiplin ilmu mungkin saja berbeda misalnya, fakta untuk sejarah terdiri atas nama pelaku, tanggal, bulan, tahun, tempat peristiwa. Contoh fakta untuk geografi ialah nama daerah, nama laut, nama gunung, tetapi dapat juga berbentuk tingkat kesuburan tanah, jumlah, puncak suatu gunung, atau suatu kondisi fisik geografis.

B. Konsep

Konsep diartikan sebagai *abstraksi*[31] *kesamaan atau keterhubbungan dari sekelompok benda atau sifat.* Dimaksudkan dengan kesamaan ialah adanya unsur-unsur yang sama baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk yang abstrak. Keterhubungan diartikan sebagai adanya hubungan antara berbagai benda atau sifat baik yang sifatnya konkret maupun yang sifatnya abstrak tertentu pula.

---

31 Hasan, H. S. *Pendidikan Ilmu Sosial.* (Jakarta: Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik). 1996. hlm.129-133

Novak dan Gowin lebih menyenangi istilah keteraturan yan dipersepsikan *(perceived regularities)* untuk menyebutkan abstraksi kesamaan antara benda atau sifat tersebut. Keteraturan yang mereka maksudkan adalah keteraturan dalam apa yang dikatakan sama-sama dimiliki suatu konsep. Suatu konsep memiliki bagian yang dinamakan atribut. Atribut adalah karakteristk yang dimiliki suatu konsep. atribut atau gabungan dari berbagai atribut menjadi suatu pembeda antara satu konsep dengan konsep lainnya. Sebagai contoh, danau memiliki atribut ukuran, bentuk,tempat, dan isi danau. Berdasarkan atribut itu danau dibedakan dengan benda lainnya tetapi untuk membedakan danau dengan laut diperlukan hanya atribut ukuran, bentuk dan tempat/lokasi. Danau memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan laut, bentuk yang berbeda serta letak yang berbeda pula. Untuk membedakan danau dari kolam renang digunakan atribut bentuk, ukuran dan juga letak. Tetapi untuk membedakan dnau, laut, dan lautan maka atribut ukuran lebih mengena. Bentuk tidak dapat digunakan sebagai pembeda anatara ketiganya (laut dan lautan tidak dapat dibedakan dari bentuk fisiknya). Letak tidak dapat juga dijadikan pembeda antara ketiganya. Walaupun letak hanya satu atribut tapi ia memiliki daya beda yang kuat untuk ketiganya.

Jumlah atribut yang dimiliki setiap konsep berbeda. Ada yang memiliki satu atribut tetapi ada pula yang lima atau lebih. Semakin banyak jumlah atribut berarti semakin banyak kesamaan yang dituntut di antara benda atau sifat yang menjadi anggota konsep tersebut. Dengan demikian ia semakin membatasi jumlah benda atau sifat yang dapat menjadi anggotanya. Hal ini disebabkan karena semakin banyak atribut semakin sulit untuk memenuhi apa yang dituntut atribut ini.

Semakin banyak atribut yang dimiliki suatu konsep semakin sedikit benda atau sifat yang dapat jadi anggotanya.

Sebagai contoh konsep danau di atas. Dengan atribut yang dimilikinya maka laut dan kolam renang tidak dapat menjadi anggtota konsep danau. Tetapi dengan menggunakan hanya atribut bentuk maka danau, laut, lautan dan juga kolam renang dapat dijadikan anggota. Untuk itu diperlukan label konsep baru yang dapat menaungi anggota-anggotanya yang banyak itu dan memiliki sifat-sifat yan sama antara anggotanya.

Hal lain yang dapat dikatakan mengenai konsep dan atributnya ialah keterhubungan antara atribut dengan nilai atribut sebagai pembeda antara satu jenis konsep dengan jenis konsep lainya. Dalam disiplin ilmu-ilmu sosial dikenal dengan adanya tiga jenis konsep berdasarkan perberdaan keterhubungan nilai atribut tersebut yakni *konsp konjungktif, konsep disjungtif, dan konsep relasional* (Bruer, Goodnow. dan Austin, 1956; De Ceccoo, 1964). Konsep konjungktif adalah konsep yang paling rendah. Dalam konsep ini benda atau sifat yang menjadi anggota konsep memiliki persamaan yang tinggi dalam nilai atributnya. Misalnya, kalau orang berbicara tentang *buku ilmiah* dengan atribut isi buku, warna sampul, ketebalan buku, serta pembaca buku. Konsep konjungtif biasanya memiliki jumlah atribut yang banyak.

Konsep disjungtif adalah konsep yang memiliki anggota dengan atribut yang memiliki nilai beragam. Pengelompokkan benda atau sifat tersebut dalam suatu konsep karena atributnya memberikan kemungkinan terjadinya perbedaan dalam nilainya. Konsep ini memang lebih tinggi kedudukkannya dibandingkan dengan konsep konjungtif dan oleh karena abstraksi terhadap nilai-nilai atributnya. Salah satu contoh konsep disjungtif ialah *alat kantor*.

Jenis konsep yang paling abstrak adalah konsep relasional. Dalam konsep ini kebersamaan anatara anggotanya dalam suatu atribut hanyalah berdasarkan kriteria yang abstrak dan selalu dalam hubungan kriteria tertentu (relasional). Ambil

contoh konsep jarak. Konsep ini dikembangkan berdasarkan kedudukkan dua titik.

Konsep dalam disiplin ilmu-ilmu sosial sangat abstrak. Konsep yang digunakan sedemikian abstrak sehingga kadang-kadang digunakan istilah konstrak *(construct)* untuk menyatakan bahwa konsep itu terbentuk sebagai hasil pemikiran abstrak. Untuk konsep yang demikin proses berfikir inferensi yang lebih tinggi diperlukan karena didalamnya terlibat berbagai kegiatan kognitif tinggi seperti pengelompokan benda atau sifat (analisis), identifikasi persamaan-persamaan (analisis), identifikasi sifat keterhubungan (analisis), menentukn keutuhan antar komponen untuk satu kelompk baru (sintesis), dan pemberian label (sintesis, karena ia harus dapat menarik kesimpulan tentang keutuhan kebersmaan antar komponen). Kenyataan ini menunjukkan bahwa Pendidikan ilmu-ilmu sosial harus mengembangkan kemampuan berpikir.

Daftar konsep yang tercantum tidak bersifat eksautif; masih banyak konsep yang dapat ditambahkan dalam daftar tersebut. Lagipula, daftar di atas hanya memuat konsep dari 6 disiplin ilmu-ilmu sosial. Konsep dari disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya tidak dicantumkan di sana hanya dengan pertimbangan bahwa keenam disiplin ilmu itu yang tertera secara jelas dalam kurikulum SMA dan tiga disiplin pertama yang tercantum dalam kurikulum SMP. Disiplin imu-ilmu sosial lain digunakan hanya materi tertentu saja dan tidak merupakan suatu keutuhan dibandingkan disiplin-disiplin di atas.

C. Teori dan Generalisasi

Teori adalah komposisi yang dihasilkan dari perkembangan sejumlah proposisi atau generalisasi yang dianggap memiliki keterhubungan secara sistematis.[32]

32 Hasan, H. S. *Pendidikan Ilmu Sosia*. (Jakarta: Dapartemen

Selain sistematis, keterhubungan antara proposisi atau pun generalisasi tersebut sudah harus teruji kebenarannya secara empirik dan berlaku universal.

Melalui teori ilmuwan menjelaskan fenomena sosial yang ada. Sebagai contoh, dalam ekonomi dikenal adanya teori tentang harga, permintaan dan penawaran, dan sebagainya. Dalam Pendidikan ilmu-ilmu sosial kedudukan teori sebagai materi kurikulum sangat penting. Hal ini terutama disebabkan kedudukan teori yang sentral dalam struktur disiplin ilmu. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa tugas suatu disiplin ilmu adalah mengembangkan teori.

Kebenaran yang menjadi idaman disiplin ilmu tercermin dalam kebenaran dan kekuatan teori yang dianutnya. Dengan menggunakan teori sebagai materi kurikulum, ada kemungkinan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan sedemikian rupa sehingga akan terjadi apa yang dimaksudkan Burner dengan *"transfer of training"*, siswa memiliki kemampuan untuk belajar sesuatu yang lain berdasarkan apa yang sudah diketahui dan dikuasainya.

Goetz dan LeCompte membagi teori atas empat jenis yaitu: *Grand theory* (teori besar), *Theoritical models* (model teoretis), *Formal and middle-range theory* (teori formal dan tingkat menengah), dan *Substantive theory* (teori substantif).[33]

Goetz dan LeCompte menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teori besar adalah sistem yang secara ketat mengkaitakan preposisi-preposisi dan konsep-konsep yang abstrak sehingga dapat digunakan menguraikan,menjelaskan, dan memprediksi secara komprehensif sejumlah fenomena besar secara non-probabilitas.

Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik). 1996. hlm.125.

33 Ibid. hlm 126

Sebagai contoh dari teori besar adalah teori challenge dan response yang dikembankan Toynbee. Dalam teori tersebut, Tonybee (1974) menjelaskan bahwa perkembangan peradaban umat manusia dalam empat masa yaitu kelahiran peradaban *(the geneses of civilizations)* pertumbuhan peradaban *(the growths of civilizations),* kemunduran peradaban *(the beakdowns of civilizations),* dan kehancuran peradaban *(the disintegrations of civilizations)*. Lebih lanjut, Toynbee (1974) menjelaskan bahwa perkembagan kebudayaan itu didasarkan atas teori tantangan dan jawaban *(challenge and response)*. Jika suatu peradaban mendapatkan tantangan yang sesuai maka akan berkembang tetapi jika tantangan itu lebih rendah atau terlalu tinggi dari kemampuan yang telah dimiliki perdaban tersebut maka peradaban tadi akan mengalami kemunduran untuk kemudian hancur.

Model teoritis adalah teori tingkat kedua. Teori ini didefinisikan oleh Goetz dan LeCompte *sebagai keterhubungan yang longgar (tidak ketat) antara sejumlah asumsi, konsep, dan preposisi yang membentu pandangan ilmuwn tentang dunia*. Teori tingkat kedua ini adalah teori yang banyak digunakan sebagai penekatan dalam melihat, mengembangkan, dan memecahkan berbagi persoalan yang diungkapkan. Oleh karena itu teori tingkat ini tidak hanya digunakan untuk menjelaskan tetapi juga secara operasional dipakai dalam mengembangkan beberapa aktivitas ilmiah. Teori-teori dalam sosiologi yang digunakan fungsionalisme, teori konflik, interaksinisme adalah contoh teori yang dinamakan model teoretis.

Teori tingkat ketiga yang dinamakan teori formal dan tingkat menengah didefinisikan sebagai *preposisi yang berhubungan yang dikembangakan untuk menjelaskan beberapa kelompok tingkah laku manusia yang abstrak*. Teori tingkat ini terbatas dalam ruang lingkupnya dibandingkan dengan kedua teori yang disebutkan terdahulu. Contoh yang dikemukakan Goetz dan LeCompte adalah teori belajar sosial *(social*

learning theory), teori konflik peran *(role conflict theory)*, teori penyimpangan kepribadian *(deviance personality theory),* dan teori motivasi *(motivation theory).*

Teori substanif *(substantive theory)* adalah teori yang paling rendah tingkatan abstraksi dan sangat terbatas dalam keumuman generalisasinya. Teori yang dikembangakan pada jenjang ini berisikan *preposisi atau konsep yang hanya berlaku untuk kelomppok populasi, lingkungan, atau waktu tertentu.* Teori-teori yang dikembangkan untuk menggambarkan pola konsumsi masyarakat tertentu di suatu wilayah tertentu dalam ekonomi adalah termasuk ke dalam kelompok teori substantif ini.

Dalam Pendidikan iilmu-ilmu sosial, teori yang kiranya dapat melibatkan siswa secara langsung dalam proses adalah teori tingkat substantif. Dalam mengembangkan proses belajar untuk membahas mengenai teori ini siswa dapat langsung mengamati objek dan mengumpulkan data dari lapangan, menarik kesimpulan generlisasi yang terbatas pada populasi yang telah mereka kaji. Sedangkan teori yang disebut sebagai model teoretis merupakan suatu yang dapat dikembangkan untuk wawasan keilmuan siswa.

Pada dasarnya generlisasi adalah sama dengan teori. *Generlisasi menggambarkan keterhubungn antara dua atau lebih konsep dan merupakan hasil yang yang sudah teruji secara empirik*[34] Generalisasi diperoleh sebagai suatu kesimpulan yang bersifat umum dari suatu penelitian yang menggunakan sampel. Atas dasar kebenaran yang ditemukan dari sampel itu maka ditariklah kesimpulan mengenai kebeneran yang sama terhadap populasi. Generalisasi berbeda dari teori dalam

34 Hasan, H. S. *Pendidikan Ilmu Sosia.* (Jakarta: Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik). 1996. hlm.128.

pengertian bahwa tingkat keberlakuan teori lebih universal dan lebih kompleks.

Contoh generalisasi: Semua masyarakat telah mengembangkan berbagai rincian tentang lembga tertentu untuk memeberikan kemudahan dalam melakukan konformitas.

BAB

4

MATERI PENDIDIKAN IPS

Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya dimana kehidupan manusia merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif. Dinamika yang menggabungkan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya sebagai ungkapan jiwa bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan juga sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya, hakikat manusia itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

Manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis, melainkan juga sebagai makhluk yang berinteraksi dengan aspeksosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut menghasilkan ilmu pengetahuan sosial (IPS) dan berkembang menjadi disiplin ilmu sesuai dengan perkembangan masyarakat seperti ilmu ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, dan sebagainya.

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya manusia harus

menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup bersama.Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) melihat bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya, dengan tetangganya dari lingkungan dekat sampai yang jauh. Bagaimana keserasian hidup baik dengan sesama manusia maupun lingkungan alamnya. Bagaimana mereka melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, bahan kajian atau bahan belajar IPS adalah manusia dan lingkungannya sebagai hakikat pendidikan IPS.

Tujuan pendidikan IPS tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan berdasarkan pada falsafah negara Pancasila dan UUD 1945, yaitu: Berdasarkan pada falsafah negara tersebut, maka telah dirumuskan tujuan pendidikan nasional, yaitu: membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapa tmenyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya, dan mencintai sesama manusia sesuai ketentuan yang termasuk dalam UUD 1945.[35]

Untuk mecapai tujuan-tujuan tersebut, maka pihak pemerhati Pendidikan atau ilmuan memiliki kewajiban untuk menentukan atau membuat rumusan mengenai ruang lingkup dari semua disiplin ilmu pengentahuan sosial.

35 Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

Adapun yang menjadi materi dalam kajian IPS meliputi :

A. Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik manusia dengan individu, manusia dengan kelompok ataupun manusia dengan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Sosiologi memiliki konsep dan teori yang unik dalam research dan permintaan-permintaan mereka. Bahkan dalam Sosiologi masyarakat itu dikatakan sebagai jelmaan waktu yang akan berubah setiap saat.[36] Kaitannya *social science* dengan Sosiologi adalah objek kajiannya manusia atau masyarakat serta dalam penggunaan konsep sering menggunakan konsep yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda dalam menggeneralisasikan suatu masalah. Sosiologi adalah istilah yang berasal dari kata latin 'socius' yang artinya 'teman', dan 'logos dari kata Yunani yang bertarti 'cerita', diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul "*Cours De Philosophie Positive*" karangan August Comte (1798-1857). Menurut Pitirin Sorokin, Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gelaja ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral), gejala non-sosial, serta ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain.

Konsep Dasar Sosiologi :

1. Interaksi sosial
2. Sosialisasi
3. Kelompok sosial
4. Pelapisan sosial
5. Proses social

---

36 Sumaatmadja, N. *Pengantar Studi Sosial,* Bandung: Alumni, 1985. Hlm. 23.

B. Antropologi

Istilah Antropologi berasal dari Bahasa Yunani, asal kata anthropos berarti manusia, dan logos berarti ilmu.Dengan demikian, secara harfiah antropologi berarti manusia. Para ahli antropologi (antropolog) sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia (Haviland, 1999: 7; Koentjaraningrat, 1987: 1-2).[37] Jadi antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaannya.

Konsep Dasar Antropologi

1. Kebudayaan

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan serta hasil karya milik manusia yang digunakan dalan kehidupan masyarakat, dimana hal tersebut dijadikan miliknya melalui belajar.

2. Enkulturasi

Enkulturasi merupakan proses individu belajar memiliki peran dalam kebudayaan masyarakatnya sendiri. Enkulturasi dapat berlangsung sejak individu masih kecil seperti mulai dari lingkungan keluarga ke lingkungan masyarakat.

37 Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi Sosialdan Budaya.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka. 1986. Hlm. 5.

3. Akulturasi

Akulturasi adalah proses pertukaran unsur kebudayaan, dimana dua kebudayaan yang berbeda terus menerus berinteraksi dalam jangka waktu yang panjang. Akulturasi juga didefinisikan sebagai perpaduan budaya yang menghasilkan suatu budaya baru tanpa menghilangkan unsur asli budaya terkait. Ada dua syarat proses akulturasi yaitu affinity atau penerimaan budaya dan homogenity atau kesamaan corak budaya yang membuat nilai baru diterima.

4. Etnosentrisme

Etnosentris merupakan sikap dari suatu kelompok masyarakat yang cenderung menggangap budayanya sendiri lebih unggul dibandingkan kebudayaan lainnya. Etnosentrisme dapat disertai dengan sikap memandang rendah masyarakat atau kebudayaan lain.

5. Tradisi

Setiap masyarakat pasti memiliki sejumlah kepercayaan ataupun tingkah laku yang menjadi bagian dari kebudayaan yang bersangkutan.Kepercayaan dan tingkah laku telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama.Bagian dari kebudayaan yang terdiri dari perilaku dan kepercayaan ini disebut sebagai tradisi.

6. Ras dan Etnik

Ras dan etnik sebenarnya merupakan dua konsep yang berbeda.Ras digunakan untuk sekelompok manusia yang memiliki kesamaan tertentu terutama dalam unsur biologis.Kelompok ras merupakan sebuah populasi dengan kesamaan unsur fisik yang khas yang dipengaruhi faktor generit. Etnik merupakan kumpulan manusia yang merasa sebagai satu kelompok karena adanya kesamaan nilai-nilai sosial yang dianut bersama,

kesamaan identitas, kesamaan pola perilaku dan unsur budaya lain yang berbeda dari kelompok lain.

7. Relativitas Budaya

Relativitas budaya digunakan untuk menyebutkan suatu kondisi dimana tingkah laku dikatakan normal dalam suatu budaya namun dipandang abnormal dalam budaya lainnya. Hal ini terjadi disebabkan setiap budaya memiliki ciri unik yang tidak muncul pada kebudayaan lain.

C. Ekonomi

Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani *(oikos)* yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan *(nomos)* yang berarti "peraturan, aturan, hukum" maka secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga".[38]

Konsep Dasar Ekonomi :

1. Keterbatasan sumber daya
2. Kebutuhan yang tidak terbatas
3. Keuntungan ekonomi
4. Kekeluargaan
5. Tenaga kerja
6. Modal

D. Geografi

Perkataan geografi berasal dari bahasa Yunani: *'geo'* berarti bumi dan *'grafhein'* berarti tulisan. Jadi secara harfiah, geografi berarti tulisan tentang bumi. Menurut para pakar: Geografi adalah ilmu kausal yang mempelajari gejala-gejala di muka bumi beserta permasalahannya melalui pendekatan

38 Sumaatmadja, N. *Pengantar Studi Sosial,* Bandung: Alumni, 1985. Hlm. 25.

keruangan (*spatial approach*), pendekatan kewilayahan (*region approach*), pendekatan kompleks wilayah *(area complex approach*) untuk program pembangunan jangka panjang, proses pembangunan dan menunjang pembangunan.[39]

Konsep Dasar Geografi :

a. Lokasi:

   Konsep lokasi ini terbagi dua yaitu lokasi absolute dan lokasi relatif. Lokasi absolute terkait dengan garis lintang dan garis bujur. Lokasi relative yaitu lokasi yang dilihat dari wilayah lain.

b. *Jarak*:

   Konsep ini mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, ataupun kepentingan pertahanan.

c. Keterjangkauan:

   Keterjangkauan *(accessibility)* tidak selalu berkaitan dengan jarak, namun juga medan.

d. *Pola*:

   Pola ini berkaitan dengan susunan, bentu kata persebaran fenomena dalam ruang muka Bumi.

e. *Morfologi*:

   Konsep ini terkait dengan pembentukan morfologi muka Bumi.

f. *Aglomerasi*:

   Konsep aglomerasi menjelaskan mengapa suatu fenomena geografi cenderung mengelompok.

---

39 Sumaatmadja, N. *Pengantar Studi Sosial,* Bandung: Alumni, 1985. Hlm. 31.

g. *Nilai kegunaan*;

Konsep ini berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah. Tiap wilayah mempunyai potensi yang bisa dikembangkan sehingga nilai kegunaannya optimal.

h. *Interelasi/interpedensi*;

Interaksi merupakan hubungan timbal balik antar beberapa hal.

i. *Diferensiasi area*;

Konsep ini mempertegas bahwa tempat yang satu dengan yang lainnya memiliki perbadaan.

j. *Keterkaitan ruangan;*

Perbedaan potensi wilayah yang satu dengan yang lainnya akan mengakibatkan atau mendorong terjadinya interaksi berupa pertukaran barang, manusia ataupun budaya.

E. Sejarah

Mahasiswa mampu mengidentifkasi konsep dasar materi IPS. Kata sejarah berasal dari beberapa bahasa di antaranya bahasa Arab (*syajarotun*) yaitu pohon, keturunan, asal-usul atau silsilah. Dalam bahasa Inggris (*history*), bahasa Yunani (*istoria*), bahasa Jerman (*geschicht*). Sejarah dalam bahasa Indonesia dapat berarti riwayat kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi atau riwayat asal-usul keturunan (terutama untuk raja-raja yang memerintah). Menurut Moh. Yamin, Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan.[40]

40 Ibid, hlm. 33

Konsep Dasar Sejarah :

1. Waktu
2. Dokumen
3. Alur peristiwa
4. Kronologis
5. Peta
6. Tahap-tahapperadaban
7. Ruang
8. Evolusi
9. Revolusi

F. PKn (Pendidikan Kewarganegaraan)

Kata Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata *Civicus* diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari definisi tersebut Civic dirumuskan dengan: "ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik), individu dengan individu dan ndividu dengan negara.[41]

Dalam hubungan ini Stanlay E. Dimond memperjelas rumusan *citizenship* dengan program *Civics* di sekolah sebagai berikut:

Citizenship as it relates to school activities has two-fold meaning. In a Narrow-sense, citizenship includes only legal status in country and the activities closely related to the political function

41 Somantri, M. N. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).2001. hlm 281

voting. governmental organization, holding of public office, and legal raight and responsibility.[42]

Hampir semua definsi mengenai Civics tersebut intinya menyebut *government,* hak dan kewajibannya sebagai warga negara dari sebuah negara. Civics dalam perkembangan selanjutnya bukan hanya meliputi *"Government"* saja, melainkan kemudian ada yang disebut dengan *Community Civics, Ekomomic Civics,* atau *Vocational Civics*.

Dalam perkembang Civics, terdapat dua gerakan yang disebutkan yaitu *"Community Civics"* dan *"Civic Education"*. Yang mana *Community Civics* merupakan gerakan pada tahun 1907 yang dipelopori oleh W.A Dunn adalah permulaan dari ingin lebih fungsionalnya pelajaran tersebut bagi para siswa dengan menghadapkan mereka kepada lingkungan ataupun kehidupan sehari-hari dalam hubungnnya dengan rung lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sedangkan *Civic Education* adalah meliputi: seluruh program sekolah, beragai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan prilaku yang lebih baik dalam hal masyarakat demokratis, termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan Syarat-syarat objektif hidup bernegara.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.Sementara itu,siswa/mahasiswa sebagai anak bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi yang memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk

42 Ibid. hlm. 282

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006: 49), adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Konsep Dasar PKn :

a. Persatuan dan kesatuan bangsa.
b. Norma, hukum, dan peraturan.
c. Hak asasi manusia.
d. Kebutuhan warga negara.
e. Konstitusi negara.
f. Kekuasan dan Politik.
g. Pancasila.
h. Globalisasi.

BAB

5

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN IPS

A. Gambaran Model Pembelajaran IPS

Model pembelajaran adalah suatu bentuk atau cara yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang dirancang atau dikembangkan dengan menggunakan pola pembelajaran tertentu atas dasar acuan teori yang sudah dibangun oleh ilmuan.

Pola pembelajaran yang dimaksud dapat menggambarkan kegiatan guru dan peserta didik dalam mewujudkan dan atau membentuk lingkungan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya proses belajar. Pola pembelajaran menjelaskan karakteristik serentetan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Pola pembelajaran dikenal dengan istilah sintaks.[43]

43 Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. *Models of Teaching (eight edition)* (Penerjemah: Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2009, hlm. 65.

Berdasarkan tujuan pendidikan IPS yakni untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, maka dalam pembelajaran IPS di Indonesia diformulasikan beberapa aspek, yaitu: (1) interaksi, (2) saling ketergantungan, (3) kesinambungan dan perubahan, (4) keragaman atau kesamaan atau perbedaan, (5) konflik dan konsesus, (6) pola (*patron)*, (7) tempat, (8) kekuasaan (*power*), (9) nilai kepercayaan, (10) keadilan dan pemerataan, (11) kelangkaan (*scarcity*), (12) kekhususan, (13) budaya (*culture*), dan (14) nasionalisme.[44]

Belakangan ini telah terjadi pergeseran pradigma dalam pembelajaran yang semula bersifat *teacher center* berubah menjadi *student center*. Perubahan ini mendorong terjadinya aktivitas belajar yang lebih berfokus pada upaya siswa untuk aktif membangun pengetahuan sendiri. Pandangan para siswa yang membangun pengetahuan mereka sendiri mempunyai implikasi besar dalam dunia pendidikan, dan pembelajaran IPS pada khususnya.[45] Model pembelajaran tersebut sering juga disebut *'kontruktivisme'* sebuah terminologi yang dapat dimetaforakan sebagai Samudra luas dan sejauh kita memandang tidak tampak batas teritorialnya. Wajar jika istilah ini banyak digunakan oleh para filsuf, perancang kurikulum, psikolog, pendidik, dan lain-lain. Glaseerfeld[46] sebagai salah seorang *pioneer* gerakan konstruktivis saat ini, menyebutnya "bidang yang saat ini, menyebutnya "bidang yang sangat luas aik dalam filsafat, psikologi, dan pendidikan".

---

44 Ibid, hlm. 69

45 Maxim, George W. (2010). Dynamic Social Studies for Constructivist Classrooms. United States of America: Linda Cox. P. 313-315.

46 Von Glasersfeld, E.: 1995, 'A Constructivist Approach to Teaching', in L. Steffe and J. Gale (eds.), *Constructivism in Education* (pp. 3–16), Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey.

Sebenarnya, perspektif pembelajaran yang sekarang makin marak tersebut, embrionya sudah lama ada dan berpijak dari penelitian sebelumnya, seperti: John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotky, Jerome Bruner, termasuk para ahli psikologi *gestalt* (Max Wertheimer, Kurt Kofka, dan Wolfgang Kohler). Prinsip dasar yang melandasi filsafat pembelajaran adalah bahwa semua pengetahuan dikonstruksikan (dibangun) dan bukan dipersepsi secara langsung oleh indra (pencium, perabaan, pendengaran, dan seterusnya) sebagaimana asumsi kaum lelis pada umumnya. Selain itu tidak ada teori konstruktivisme tuggal, tetapi sebagian besar para ahli aliran ini memiliki setidaknya dua ide utama yang sama; (a) pembelajaran aktif dalam mengkostruksikan pengetahuannya sendiri, dan; (b) intraksi sosial merupakan aspek penting bagi mengkonstruksikan pengetahuan (Bruning, Scraw, Norby dan Roning, 2004: 195). Filosofi ini memandang belajar lebih dari sekedar menerima dan memperoses informasi yang disampaikan oleh guru atau teks. Alih-alih pembelajaran adalah membangun pengetahuan yang bersifat aktif dan personal.[47] Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Von Glasserfeld.[48] pendiri gerakan ini yang memukakan asumsinya bahwa pengetahuan, dengan tidak peduli bagaimana pengetahuan itu didefinisikan, terbentuk di dalam otak manusia, dan objek yang berpikir tidak memiliki alternatitif selain mengkonstruksikan apa yang diketahui berdasarkan pada pengalamanya sendiri, dan oleh karenanya bersifat subjektif, namun jauh lebih bermakna serta lebih komperhensif dan tidak persial.

1. Pengertian pembelajaran IPS yang *powerful*

Belakangan ini telah terjadi pergeseran pradigma dalam pembelajaran yang semula bersifat *teacher center* berubah

47 De Kock, Sleegers, dan Voeten, new learning and the classification of learning environments in secondary education. 2004:p. 153.

48 Ibid, hlm. 114

menjadi *student center*. Perubahan ini mendorong terjadinya aktivitas yang lebih berfokus pada upaya siswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Pandangan para siswa yang membangun pengetahuan mereka sendiri memunyai implikasi besar dalam dunia pendidikan, dan pembelajaran IPS pada khususnya[49]. Model pembelajaran tersebut sering juga disebut *'konstruktivisme'* sebuah *terminology* yang dapat dimetaforakan sebagai samudra luas dan sejauh kita memandang tidak tampak batas teritorialnya. Wajar jika istilah ini banyak digunakan oleh para filosuf, perancang kurikulum, psikolog, pendidik, dan lain-lain. Glaseerfeld sebagai salah seorang pionir gerakan konstruktivis saat ini, menyebutnya "bidang yang sangat luas baik dalam filsafat, psikologi, dan pendidikan". [50]

Sebenarnya, perspektif pembelajaran yang sekarang makin marak tersebut, embrionya sudah lama ada dan berpijak dari penelitian sebelumnya, seperti: John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotky, Jerome Bruner, termasuk para ahli psikologi *gestalt* (Max Wertheimer, Kurt Kofka, dan Wolfgang Kohler). Perinsip dasar yang melandasi filsafat pembelajaran adalah bahwa semua pengetahuan dikonstruksikan (dibangun) dan bukan dipersepsi secara langsung oleh indra (penciuman, perabaan, pendengaran, dan seterusnya) sebagaimana asumsi kaum realis pada umumnya. Selain itu tidak ada teori konstruktivisme tunggal, tetapi sebagian besar para ahli aliran memiliki setidaknya ide utama yang sama; (a) pembelajaran aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri, dan; (b) intraksi sosial merupakan aspek penting bagi pengkonstruksian pengetahuan. [51]

---

49 Ibid, hlm. 313-315

50 Ibid, hlm. 204

51 Bruning, Scraw, Norby dan Roning, Creativity in Science: Tensions between Perception and Practice. 2004, p. 195.

Filosofi ini memandang lebih dari sekedar menerima dan memperoses informasi yang disampaikan oleh guru dan teks. Alih-alih pembelajaran adalah membangun pengetahuan yang bersifat aktif dan personal.[52]

2. Karaktristik kualitas pembelajaran IPS yang *powerful*

Pembelajaran studi sosial/IPS yang kuat dan autentik dimulai dengan pengetahuan yang mendalam dan pemahaman tentang subjek dan tujuan yang unik. Pembelajaran IPS mempersiapkan siswa untuk mengidentifikasi, memahami, dan bekerja untuk memecahkan tantangan yang dihadapi bangsa kita yang beragam didunia yang semakin saling tergantung.[53] Pembelajaran IPS harus membantu siswa dalam belajar untuk menggunakan berbagai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang akan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab sepanjang hidup mereka. Warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab perlu menguasainya secara arif dan bijaksana, berpartisipasi dalam komunitas, terlibat dalam politik, ekonomi, budaya, historis, geografis, dan sosialis, serta menunjukkan kebajikan moral yang berkeadilan.[54] Selain itu, pembelajaran IPS dalam jurnal NCSS pada sebuah penelitian berjudul *A vision of powerful teacing and learning in the social studies: building social understanding and civic efficacy* (NCSS, 1933), memiliki prinsip pembelajaran IPS yang *powerfull* ketika bermakna.

Kurikulum studi sosial yang bermakna terkait jaringan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap yang terstruktur

---

52 Ibid, hlm. 153.

53 Ohmae, K. The Rise of the Region State, 1993, p. 183-185.

54 Sunal, C. Z. and Haas, M. E.. *Social Studies and The Elementary/ Middle School Student*, New York: Holt Rinchart and Winston. Inc. 1993. p 71.

sekitar pemahaman pertanyaan penting ide-ide penting, dan tujuan harus menggambarkan:

1. Konsep-konsep utama dan tema-tema yang dikembangkan harus dilakukan secara mendalam. Pembelajaran IPS yang paling efektif ketika para guru tidak menghambur-hamburkan usaha mereka dengan mencakup terlalu banyak topik yang luas dan dangkal. Walaupun keluasan adalah hal penting, tetapi pemahaman yang mendalam yang diajarkan dengan penuh kearifan, adalah hal utama untuk mempersiapkan siswa dalam memahami isu-isu kewarganegaraan abad ke dua puluh satu yang semakin komplek sini.[55]

2. Keterampilan-keterampilan berpikir maupun bertindak perlu segera ditekankan untuk membantu siswa kita agar terus berkembang dalam dunia yang penuh percepatan perubahan terus menerus di lingkungan kita. Ini termasuk kepekaan seorang pembelajar untuk segera mengetahui perspektif inter/multidisiplinerdarimasalah-masalahsosial yang terjadi di lingkungannya. Siswa sebagai pembelajar harus segera menganalisis, melakukan suatu penyelidikan dan berpikir kritis, berkomunikasi, menganalisis data dan menggunakan teknologi media secara tepat dan bijaksana di abad ke dua puluh satu yang serba eksklaratif karena majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. [56]

3. Guru harus reflektif baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam pengembangan kurikulum yang bermakna. Guru harus reflektif betul mengenai sifat-sifat dan tujuan dari studi sosial, memiliki pemahaman yang trus berkembang dari disiplin ilmu yang mereka ajarkan, dan

---

55 Brophy J. dan Alleman J., 2008, *Research in Social Studies Education*, New York: Routledge, p. 33-34.

56 Swan M., 2008, Talking Sense About Learning Strategies, RELC Journal, v.1. No.1, USA. pp. 309-310.

mengikuti perkembangan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang studi sosial/IPS.

4. Kurikulum yang bermakna meliputi studi ekstensif dan reflektif tentang negara sendiri (Indonesia) maupun negara-negara lain. Studi ini baik dalam perspektif kajian sejarah, sosial, budaya, dan agama mengingat di era globalisasi hampir tidak ada batas-batas secara politis, ekonomi, dan budaya.

B. Model-Model Pembelajaran IPS

1. Pengertian Model-Model Pembelajaran IPS

Model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merangsang pembelajaran tatap muka di dalam kelas atau dalam latar tutorial dan dalam membentuk materi-materi pembelajaran termasuk buku-buku, film-film, pita kaset, dan program media komputer dan kurikulum. Menurut Bruce Joyce dan Marsha Weil (1986), mengatakan bahwa setiap model membimbing kita ketika kita merancang pembelajaran untuk membantu para siswa mencapai berbagai tujuan. Tim MKDP (2011) menyatakan bahwa model pembelajaran memuat antara lain:

1. *Syntax*, yaitu serangkaian tahapan langkah-langkah yang kongret atau lebih khusus yang harus diperankan oleh guru dan siswa
2. Sistem sosial yang diharapkan
3. Prinsip-prinsip reaksi siswa dan guru
4. Sistem penunjang yang diisyaratkan.

2. Jenis-jenis Model Pembelajaran

Dalam pembelajaran IPS, lebih menekankan pada *student center* agar siswa mampu membangun perang kognitif dalam diri siswa dan diharapkan siswa berusaha mencari

serta menemukan masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran atau saat berada dalam lingkungan tempat tinggal di mana siswa itu berada. Dari perang kognitif dalam diri siswa tersebut, maka siswa mampu membangun pengetahuan dari pengalaman dan hasil interaksinya sendiri. Kurikulum 2013 memiliki karakteristik tersebut serta memiliki empat standar model pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian materi kepada peserta didik, yaitu model inkuri, model *discovery*, model pemecahan masalah, dan model pembelajaran projek.

a. Model Pembelajaran Inkuiri (*Inqury Learning*)

Secara umum istilah *"inqury"* berkaitan dengan masalah dan penelitian untuk menjawab suatu masalah. Menurut Roger (1969), inkuiri merupakan suatu proses untuk mengajukan pertanyaan dan mendorong semangat belajar siswa pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah. Beyer (1971) menyatakan *"inquryis one way of knowing"* yang diartikan sebagai suatu cara untuk mengetahui. Istilah inkuiri digunakan dalam aktivitas penelitian, khususnya pada proses melakukan investigasi. Inkuiri dibutuhkan dalam proses penelitian sebagai metode untuk mengkaji fenomena.

Para ahli pengajaran Ilmu-ilmu sosial khususnya di Amerika Serikat dan Australia memilih pendekatan inkuiri yang lebih menekankan pada belajar secara individual sebagai alternatif untuk mengembangkan kemampuan belajar. Menurut Banks (1990) pendekatan mengajar dalam IPS dengan menggunakan inkuiri sosial untuk menghasilkan fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Tujuan inkuiri sosial adalah dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah sosial sehingga mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.[57]

57 Banks, J. A. (1990). *Teaching Strategies for The Social Studies.* New York: Longman. p 32.

Menurut Hoge, Pengajaran inkuiri adalah pengajaran yang membantu siswa untuk menguji pertanyaan-pertanyaan, isu-isu, atau masalah yang dihadapi manusia dan sekaligus menjadi perhatian guru.[58] Dalam pengajaran inquiry siswa menjadi seorang mencari ilmu, sedangkan guru berfungsi sebagai pembantu investigator (*coinvestigator*). Maksud bahwa siswa menjadi investigator tidak berarti bahwa metode inquiry harus dilakukan dengan survey atau penelitian, tetapi guru dapat mendorong siswa untuk berpikir secara kritis (*critical thingking*). Survey atau penelitian adalah hanyalah salah satu bentuk saja dalam pengajaran inquiry. Ada beberapa untuk pengajaran inquiry, yaitu: percobaaan (*experiment*), studi kepustakaan (*library research*), wawancara (*interview*), dan peneitian produk (*product investigation*), dan ini menuntut siswa untuk berpartisipasi.

1. Langkah-langkah Model Pembelajaran Inkuiri

Berikut ini Langkah-langkah Model Pembelajaran Inkuiri

1. Merumuskan masalah. Sebelum peserta didik melakukan penelitian, terlebih dulu harus memiliki ide yang jelas atau masalah yang akan dipecahkan.
2. Perumusan hipotesis. Setelah peserta didik merumuskan masalah atau pertanyaan yang tepat dan dapat diteliti selanjutnya ia harus berusaha merumuskan dugaan atau jawaban sementara untuk mengarahkan proses penelitian.
3. Definisi istilah atau *konseptualisasi*. Pada awal proses inkuiri peneliti harus membuat definisi istilah atau konsep yang jelas tentang masalah penelitiannya.

58 Somantri, M. N. ,dkk. *Inovasi Pembelajaran IPS*. (Bandung: Rizqi Press). 2010. hlm.49

4. Pengumpulan data. Pertanyaan dijawab dan hipotesis diuji dengan data dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.
5. Pengujian dan analisis data. Seorang peneliti dalam proses inkuiri harus berusaha menentukan kredibilitas dan kebermaknaan informasi yang sedang dikumpulkan.
6. Menguji hipotesis dan memperoleh generalisasi dan teori. Seorang siswa calon ilmu asosial memulai rangkaian proses penelitian dengan sebuah pertanyaan, biasanya berkaitan dengan teori atau pengetahuan yang telah ada. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu sendiri dapat diuji secara langsung. Ketika data dikumpulkan dan dianalisis, peneliti berusaha menguji apakah hipotesisnya dapat dibuktikan dengan berdasarkan pada informasi yang telah terkumpul.
7. Memulai inkuiri lagi.

2. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inkuiri

a. Kelebihan

Ada beberapa kelebihan dari penggunaan model inkuiri dalam pembelajaran yaitu:

1. Dapat meningkatkan potensi intelektual siswa
2. Ketergenatungan siswa terhadap kepuasan ekstrinsik bergeser kearah kepuasan intrinsik.
3. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat penyelidikan karena terlibat langsung dalam penemuan
4. Dapat memperpanjang proses ingatan
5. Pengajaran menjadi terpusat pada siswa
6. Dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri siswa

7. Dapat mengembangkan bakat
8. Dapat menghindari dari belajar dengan hafalan
9. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencerna dan mengatur informasi yang didapatkan.

b. Kekurangan

Adapun kekurangan dari pelaksanaan model pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut:

1. Mengandalkan kesiapan berfikir, sehingga siswa yang mempunyai kemampuan berfikir lambat bias kebingunan dalam berfikir secara luas, membuat abstraksi, menemukan hubungan antar konsep dalam suatu mata pelajaran, atau menyusun sesuatu yang telah diperoleh secara tertulis maupun lisan.
2. Tidak efisien, khususnya bila jumlah siswa terlalu banyak sehingga akan menghabiiskan waktu yang lebih banyak.
3. Lebih menekankan pada penguasaan kognitif serta mengabaikan aspek sikap dan keterampilan.
4. Memerlukan sarana dan fasilitas

b. *Discovery Learning* (Pembelajaran Penemuan)

Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. Tahapan perencanaan dalam pembelajaran *discovery* adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan pembelajaran
2. Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya

3. Memilih materi pelajaran.
4. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi)
5. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa
6. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana kekompleks, dari yang konkret keabstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai kesimbolik
7. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa.

Adapun Langkah-langkah dalam Pembelajaran *discovery* adalah sebagai berikut:

1. *Stimulasi*. Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan.
2. *Problem statemen*. Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah)
3. Data *collection*. Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, dengan demikian anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan (*collection*) berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.

4. Data *processing*. Menurut Syah (2004:244) pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bilaperlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu

5. *Verification*. Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data *processing*. *Verification* menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.

6. *Generalization*. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. [59]

Muhibbin, Syah. (2004). Psikologi Pendidikan. Bandung: PT .Remaja Rosdakarya. Hlm. 244 ٥٩

Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*) adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan

1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini, seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya.
2. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer.
3. Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil.
4. Metode ini memungkinkan siswaberkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri.
5. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri.
6. Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh kepercayaan bekerjasama dengan yang lainnya.
7. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak sebagai siswa, dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi.
8. Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keraguraguan) karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.
9. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik
10. Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru.

b. Kekurangan:

1. Metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untukbelajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berfikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi.
2. Metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya.
3. Harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama.
4. Pengajaran *discovery* lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian.
5. Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berfikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.

3. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*)

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Menurut Woods (1989), cara mengembangkan keterampilan *problem solving* siswa adalah membuat mereka senang belajar, membuat mereka belajar terbaik, belajar terarah sendiri, mengembangkan keterampilan kelompok, mewawancarai siswa setelah melakukan aktivitas, mengembangkan dan mengukur kepercayaan diri. Adapun ciri-ciri dari

pembelajaran pemecahan masalah adalah objektif, rasional, kritis, evolusioner, realistis, dan pluralistik. Tahapan-tahapan pembelajaran *problem based learning* adalah seperti pada gambar di bawah ini.

Tabel 2: Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah

Tahapan-Tahapan	Perilaku Guru
Tahap 1 Orientasi peserta didik kepada masalah	Menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik yang dibutuhkan dan memotivasi untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih
Tahap 2 Mengorganisasikan peserta didik	Membantu peserta didik dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan materi yang berhubungan dengan topik tersebut
Tahap 3 Membimbing penyelidikan individu dan kelompok	Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melakukan eksperimen untuk memperoleh penjelasan dalam memecahkan masalah
Tahap 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti, laporan, model dan berbagi tugas dengan teman.
Tahap 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mengevaluasi hasil belajar mengenai materi yang sudah diajarkan dan meminta kelompok untuk mempersentasikan hasil temuannya

4. Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based learning*)

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata.

Adapun kriteria pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut:

1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja,
2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik,
3. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan,
4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan
5. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu
6. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan,
7. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif.

Peran guru pada Pembelajaran Berbasis Proyek adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mendesain pembelajaran,
2. Membuat strategi pembelajaran,
3. Membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan peserta didik,
4. Mencari keunikan peserta didik,

5. Menilai peserta didik dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian dan
6. Membuat portofolio pekerjaan peserta didik.
7. Peran Peserta Didik pada Pembelajaran Berbasis Proyek adalah:
8. Menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir
9. Melakukan riset sederhana
10. Mempelajari ide dan konsep baru
11. Belajar mengatur waktu dengan baik
12. Melakukan kegiatan belajar sendiri atau kelompok
13. Mengaplikasikan hasil belajar lewat tindakan
14. Melakukan interaksi sosial (wawancara, survey, observasi, dan lain-lain)

Langkah-langkah Pembelajaran berbasis Proyek adalah seperti pada gambar dibawah ini:

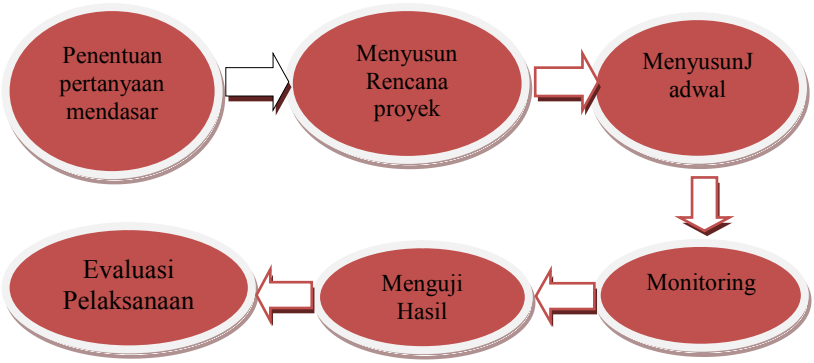

Keuntungan Pembelajaran Berbasis Proyek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai.
2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.

3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks.
4. Meningkatkan kolaborasi.
5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi.
6. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber.
7. Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas.
8. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata
9. Melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata.
10. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga pesertadidik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran.

Kelemahan Pembelajaran Berbasis Proyek adalah:

1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah.
2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak
3. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas.
4. Banyaknya peralatan yang harus disediakan.
5. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan.

6. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok.
7. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bias memahami topik secara keseluruhan

C. Teknik-teknik Pembelajaran IPS

Menurut Robin Fogarly, ada sepuluh cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu (IPS) yaitu: *fragmented, connected, nested, sequenced, shared, webbed, threaded, integrated, immersed, dan networked*.[60]

1. Model Penggalan (*Fragmented*) seperti pembelajaran tradisional yang memisah-misahkan disiplin ilmu atas beberapa, seperti matematika, sains, bahasa, studi sosial, serta humoniora. Model ini mengajarkan disiplin-disiplin ilmu secara terpisah tanpa adanya usaha untuk mengaitkan atau memadukan
2. Model Keterhubungan (*Connected*) dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu.
3. Model Sarang (*Nested*) merupakan pemaduan berbagai bentuk keterampilan penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran.
4. Model Urutan atau Rangkaian (*Sequenced*) merupakan model pemanduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel.
5. Model berbagi (*Shared*) merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya *"over lapping"* konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih.

---

60 Fogarty, Robin. 1991. How to Integrated the Curricula. Palatine, Ilinois: IRI/ Skylight Publishing, Inc.p 35

6. Model Jaring Laba-laba (*Webbed*) merupakan pendekatan tematis yang sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran terpadu jejaring merupakan model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang berkecenderungan dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain.
7. Model Galur (*Threaded*) merupakan pendekatan pembelajaran yang ditempuh dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupkan benang merah (galur) yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu.
8. Model Keterpaduan (*Integrated*) merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Dalam model ini perlu ada satu tema sentral yang akan dibahas yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu.
9. Model Celupan (*Immersed*) merupakan model yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan "me" dan pemakaiannya
10. Model Jejaring (*Networked*) merupakan pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah peserta didik mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda.

Abad ke-21 pembelajaran yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS adalah keterampilan berpikir kritis yang menekankan kepada guru untuk menggunakan pembelajaran yang berbasis HOTS (*Higher Order Thinking of Skills*) bukan LOTs (*Lower Order Thinking of Skills*). Karena generasi yang diharapkan untuk 10 tahun atau 20 tahun kedepan adalah generasi yang siap akan tantangan global sesuai dengan

tujuan dari filsafat pendidikan yaitu; 1) *Transfer of knowledge*, 2) Memanusiakan manusia, 3) menjadikan manusia muda menjadi dewasa dan siap di masa mendatang.

B A B

6

PENDIDIKAN IPS DAN GLOBALISASI

A. Menelusuri Makna Globalisasi

Secara etimologis, globalisasi berasal dari kata *"globe"* yang berarti bola dunia, sedangkan akhiran sasi mengandung makna sebuah "proses" atau keadaan yang sedang berjalan atau terjadi saat ini. Jadi, secara etimologis, globalisasi mengandung pengertian sebuah proses mendunia yang tengah terjadi saat ini menyangkut berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat, bangasa, dan negara-negara di dunia.[61]

Alwi Dahlan (1996) mengetengahkan makna globalisasi yang didekati dari dua pemaknaan, yaitu memaknaan *pertama*, globalisasi dikatakan sebagai sebuah proses meluas atau mendunianya kebudayaan manusia, karena difasilitasi media komunikasi dan informasi yang mendukung kearah perluasan budaya atau nilai budaya masyarakat yang menjadi milik

61 A. Ubaedillah, dkk. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: ICCE UIN Jkt, 2006, hlm. 70.

seluruh bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa globalisasi pada intinya mengembangkan perusahaan yang dapat masuk ke mana-mana dan tidak akan terhambat oleh kekuasaan negara bangsa yang akan berakhir, perusahaan lebih kenyal dan efisien dari pada negara, dan arena itu lebih lincah menggelobal.

Proses globalisasi tersebut tidak berlangsung secara parsial melainkan secara simultan, artinya adanya keterkaitan atau slaing mempengaruhi atau saling memberikan imbas kepada dimensi atau aspek-aspek lainnya. Saluran yang dapat dijadikan sebagai sarana gelobalisasi, yaitu jalur teknologi komunikasi, teknologi informasi, teknologi kendali, perdagangan internasional, pendidikan, dan organsisasi internasional.[62]

Dalam konteks globalisasi, pendidikan berperan strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam percaturan internasional. Porter menyatakan bahwa pada dasarnya setiap negara memiliki dua jenis keunggulan yakni kenggulan komparatif dan dan kenggulan kompetitif. Kenggulan komparatif (*comparative advantages*) berkenan dengan ketersediaan sumber daya alam (*natural resource*) dalam suatu negara. Sedangkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia (*human resoures*) yang handal dan berkualitas.[63]

Harold G. Shane. Mengemukakan empat potensi signifikansi pendidikan terhadap dunia masa depan yaitu sebagai berikut.

1. Pendidikan adalah cara yang mapan untuk memperkenalkan siswa pada keputusan sosial yang timbul.
2. Pendidikan merupakan wahana untuk menanggulangi masalah-masalah social yang timbul.

62 Ibid, hlm. 71

63 Ibid, hlm. 73

3. Pendidikan telah memperlihatkan kemampuan yang meningkat untuk menerima dan mengimplementasikan alternatif-alternatif baru.
4. Pendidikan merupakan cara terbaik untuk yang dapat ditempuh masyarakat untuk membimbing perkembangan dan terdorong untuk memberikan kontribusi pada kebudayaan hari esok.

Bukan rahasia lagi saat ini dunia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat dan negara. Batas-batas teritorial antar negara yang sebelumnya menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam konteks hubungan antar bangsa dan negara, kini hal itu tidak menjadi kendala yang berarti. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam eskalasi yang tinggi terutama teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menyebabkan batas-batas atau sekat-sekat geografis antar negara dan bangsa seolah tak nampak lagi. Pantas, kalau banyak pihak mengatakan bahwa kencendrungan kehidupan bangsa dan negara saat ini mengarah kepada terbentuknya sesuatu masyarakat global (*global village*).[64]

B. Keterkaitan Identitas Nasional dengan Globalisasi

Globalisasi diartikan sebagai suatu era atau zaman yang ditandai dengan perubahan tatanan kehidupan dunia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi sehingga interaksi manusia nienjadi sempit, serta seolah-olah dunia tanpa ruang.[65] Era Globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era Globalisasi tersebut mau tidak mau, suka tidak

64 Sapriya, *Pendidikan IPS Konsep Dan Pembelajaran* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 2009. hlm.123

65 A. Ubaedillah, dkk. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: ICCE UIN Jkt, 2006, hlm. 71.

suka telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut, ada yang bersifat positif ada pula yang bersifat negatif. Semua ini merupakan ancaman, tantangan, dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi di segala aspek kehidupan. Di era globalisasi, pergaulan antar bangsa semakin ketat. Batas antarnegara hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kental itu, akan terjadi proses akulturasi, saling meniru, dan saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing.

Konsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional juga sesuatu yang terbuka, dinamis, dan dialektis untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Krisis multidimensi yang kini sedang melanda masyarakat kita menyadarkan bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan Identitas Nasional kita telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara kita dalam Pembukaan, khususnya dalam Pasal 32 UUD 1945 beserta penjelasannya, yaitu: "Pemerintah memajukan Kebudayan Nasional Indonesia"[66] yang diberi penjelasan: "Kebudayan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat ebagi puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia ".

66 Undang-Undang Dasar 1945

Dengan demikian secara konstitusional, pengembangan kebudayan untuk membina dan mengembangkan identitas nasional kita telah diberi dasar dan arahnya, terlepas dari apa dan bagaimana kebudayaan itu dipahami yang dalam khasanah ilmiah terdapat tidak kurang dari 166 definisi sebagaimana dinyatakan oleh Kroeber dan Klukhohn di tahun 1952 Kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (*working definition),* sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (*values*) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/ psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan.

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau *world culture*) telah terlihat semenjak lama. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini (Lucian W. Pye, 1966).

Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.

Ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan:

1. Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
2. Penyebaran prinsip multi kebudayaan (*multiculturalism*), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
3. Berkembangnya turisme dan pariwisata.
4. Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
5. Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
6. Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti Piala Dunia FIFA.[67]

Munculnya arus globalisme yang dalam hal ini bagi sebuah Negara yang sedang berkembang akan mengancam eksistensinya sebagai sebuah bangsa. Sebagai bangsa yang masih dalam tahap berkembang kita memang tidak suka dengan globalisasi tetapi kita tidak bisa menghindarinya. Globalisasi harus kita jalani ibarat kita menaklukan seekor kuda liar kita yang berhasil menunggangi kuda tersebut atau kuda tersebut yang malah menunggangi kita. Mampu tidaknya kita menjawab tantangan globalisasi adalah bagaimana kita bisa memahami dan malaksanakan Pancasila dalam setiap kita berpikir dan bertindak.

67 Ibid, hlm. 73.

Persoalan utama Indonesia dalam mengarungi lautan Global ini adalah masih banyaknya kemiskinan, kebodohan dan kesenjangan sosial yang masih lebar. Dari beberapa persoalan diatas apabila kita mampu memaknai kembali Pancasila dan kemudian dimulai dari diri kita masing-masing untuk bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, maka globalisasi akan dapat kita arungi dan keutuhan NKRI masih bisa terjaga.

C. Glokalisasi

Salah satu yang ikut berkembang Bersama globalisasi adalah glokalisasi. Istilah globalisasi dipopulerkan oleh Roland Robertson pada tahun 1977 dalam suatu konferensi tentang *"Globalization and Indigenous Culture"*. Secara umum, glokalisasi adalah penyusaian produk global dengan karakter lokal. Ada juga yang mengtakan bahwa glokalisasi adalah *think globally and act locally* (berpikir global namun bertindak lokal). Menurut Eko Budiarjo, Guru Besar Universitas Diponegoro, Glokalisasi berarti *globalization with local flavor* (globalisasi dengan cita rasa lokal). Dengan demikian, glokalisasi menjadi strategi yang muncul sebagai kritik terhada konsep perdagangan bebas yang tidak menspesialisasikan sebuah negara sesuai dengan potensinya.[68] Karena itu para produsen mengkondisikan sebuah negara (pasar) agar berada dalam satu latar belakang sosial budaya yang sama dengan negara lain. Misalnya, coca-cola atau McDonald menggunakan artis lokal sepeti Sheila on 7, Slank, atau Krisdayanti sebagai bintang iklan untuk mendekati pasarnya di Indoesia.

Dalam wilayah budaya, glokalisasi dimaknai sebagai munculnya interpretasi produk-produk global dalam konteks lokal yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai wilayah budaya. Interpretasi lokal masyarakat tersebut kemudian

68 A. Ubaedillah, dkk. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: ICCE UIN Jkt, 2006, hlm.75.

juga membuka kemungkinan adanya pergeseran makna atas nilai budaya. Contohnya, restoran siap saji di Amerika dan Eropa yang masuk dalam golongan restoran *junk-food* yang dikonsumsi oleh kelas pekerja atau pelajar, di Indonesia hadir sebagai tempat yang elit atau eksklusif. Artinya, ada interpretrasi dan cara pandang yang berbeda dari masyarakat Indonesia dan Amerika atau Eropa dalam mengonsumsi makanan siap saji.

Dalam rangka glokalisasi bidang arsitektur dan perkotaan, yang berhasil masuk dalam buku *The Best Architecture in the World* (1999) adalah kompleks Citra Niaga di Samarinda dan perkampungan Lembah Code binaan Romo Mangun di Yogyakarta yang memiliki karakter atau keunikan lokal, Ironisnya, kedua karya unggulan tersebut tidak memperoleh perhatian yang semestinya dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahkan lebih tragis lagi baha salah satu rumah bambu yang estetis di lokasi terdepan Lembah Code ternyata sudah lenyap, tergusur akibat pelebaran Jembatan Sudirman.

Salah satu medium yang digunakan dalam proses glokalisasi adalah bahasa.[69] Bahasa mampu mendekatkan emosi hingga produk global terasa lokal. Sebuah tayangan telenovela Amerika Latin yang membuat ibu-ibu Indonesia setia menonton tidak berarti para ibu itu tertarik dengan budaya Amerika Latin. Tetapi sebenarnya karena sebagian besar telenovela itu jalan ceritanya mengandalkan konflik keseharian manusia, dari perebutan warisan, perselingkuhan, hingga persaingan bisnis.

69 Ibid, hlm. 70

B A B

7

NILAI DAN KEARIFAN LOKAL

A. Nilai

1. Pengertian Nilai

Pada hakikatnya, nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud di sini adalah seperangkat keyakinan atau perinsip prilaku yang telah memperibadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkat ketika berpikir atau bertindak.[70] Umumnya, nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antar individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan keagamaan, kelompok masyarakat atau persatuan dari orang-orang yang satu tujuan.

Nilai yang ada di masyarakat sangat bervariasi sesuai dengan tingkat keberagaman kelompok masyarakat. Heterogenitas nilai ini tentu menimbulkan masalah tersendiri

70 Sapriya, *Pendidikan IPS Konsep Dan Pembelajaran* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 2009. hlm. 53

bagi guru dalam pembelajaran IPS di kelas. Di satu pihak, nilai dapat masuk kepada masyarakat dan tidak mungkin steril dari isu-isu yang sedang menerpa dan terhindarkan dalam masyarakat demokratis. Di pihak lain, tidak terpungkiri bahwa nilai tertentu muncul dengan kekuatan yang sama di masyarakat dan menjadi pembelajaran yang baik serta menjadipelindung dari berbagai penyimpangan dan pengaruh luar. agar dapat kejelasan dalam mengkaji nilai di masyarakat, maka nilai dapat dibedakan atas nilai subtantif dan nilai prosedural.

a. Nilai Subtantif

Nilai Subtantif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan hanya sekedar menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya tentang sesuatu hal.[71] Misalnya, seorang anggota keluarga akan berbeda pandangannya tehadap nilai hidup berkeluarga. Demikian pula dalam bertindak sebagai anggota keluarga. Hal ini bergantung pada kondisi atau iklim keluarga masing-masing yang berbeda satu sama lain. Ada kondisi keluarga yang harmonis, dalam intraksi saling menghargai, bertutur kata halus, disiplin, dan sebagainya, namun ada pula kondisi keluarga yang serba kaku, bertutur kata kasar, saat bicara saling membentak, dan sebagainya.

Kondisi keluarga yang mencerminkan nilai yang dianut oleh keluarga yang berbeda-beda perlu dikenali oleh para siswa, dalam pembelajaran IPS. Serta pelajar dapat mengenal implikasi dari kondisi keluarga bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Demikian pula, ketika para siswa mempelajari dampak teknologi terhadap kesempatan kerja, seperti industri, pemerintahan, lembaga pelatihan, kedudukan nlai bagi

71 Ibid, hlm. 54

kelompok masyarakat dan individu merupakan komponen yang penting bagi pembelajaran IPS.

Dalam mempelajari nilai subtantif, para siswa perlu memahami, proses-proses, lembaga-lembaga, dan aturan-aturan untuk memecahkan konflik dalam masyarakat demokratis. Dengan kata lain, siswa perlu mengetahui bahwa ada keragaman nilai alam masyarakat dan mereka perlu mengetahui isi nilai dan implikasi dari nilai-nilai tersebut. Dengan belajar nilai subtantif, siswa seyogianya menjadi terampil dan menganalisis kedudukan nilai dari keanka ragaman kelompok dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. apa yang dilakukan oleh kelompok, individu, saat ini atau masa lalu?
2. Apa alasan mereka?
3. Pertunjukan apa yang penting bagi mereka?
4. Apa bila kamu punya jabatan, apa yang akan kamu lakukan?

Manfaat lain dari belajar nilai subtantif adalah siswa akan menyatakan bahwa dirinya memiliki nilai tertentu. Guru harus menjelaskan bahwa siswa membwa nilai yang beragam kelas sesuai dengan latar keluarga, agama, atau budaya. selain itu, guru perlu menyadari pula bahwa nilai yang dia anut tidak semuanya berlaku secara universal.

Program pembelajaran IPS hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan, merefleksikan, dan mengartikulasikan nilai-nilai yang dianutnya. Proses ini tergatung pada nilai-nilai procedural dikelas. Siswa hendaknya memiliki hak mengambil posisi nilai mana yang akan dianut tanpa paksaan, atau menangguhkan, keputusan dan tetap tidak mengambil keputusan. Dengan kata lain, siswa hendaknya didorong untuk bersiap diri

membenarkan posisinya, mendengarkan kritikan yang ditujukan terhadap dirinya dan atau mengubah keputusannya bila ada pertimbangan lain.

b. Nilai Prosedural

Peran guru dalam dimensi nilai sangat besar terutama dalam melatih siswa sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di kelas, Nilai-nilai procedural yang perlu dilatih atau dibenarkan antara lain nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran dan menghargai pendapat orang lain.[72] Nilai-nilai kunci ini merupakan nilai yang menyosong masyarakat demokrasi, seperti: toleran terhadap pendapat yang berbeda menghargai bukti yang ada, kerja sama,dan menghormati pribadi yang lain. Apabila kelas IPS dimaksudkan untuk mengmbangkan partisipasi siswa secara efektif dan diharapkan semakin memahami kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam maka siswa perlu mengenal dan berlatih menerapkan nilai-nilai tersebut.

Pengajaran yang mengaitkan nilai pendidikan nilain ini secara eksplisit atau implisit hendaknya telah ada dalam langkah-langkah atau proses pembeljaran dan tindakan menjadi bagian dari konten tersendiri. Dengan kata lain, nilai-nilai ini tidak perlu dibelajarkan secara terpisah. Selain itu, masyarakat demokratis yng ideal harus mampu mengungkapkan nilai-nilai pokok dalam proses pembelajaran bukan hanya retorika semata bahkan harus menghormati harkat dan martabat manusia, berkomitmen terhadap keadilan sosial, dan memperlakukan manusia sama kedudukannya didepan hukum.

Selanjutnya tentang nilai, menurut Djahiri: "Nilai merupakan standar penuntun orang untuk berbuat terarah, indah, baik, efisien dan berharga/bermutu serta benar dan

72 Ibid, hlm. 55

adil…".[73] Ahmadi (1991, hlm. 198) menjelaskan: "Nilai adalah seperangkat keyakinan atau perasaan sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus pada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku". Adapun menurut Cynthia S. Sunal dan Mary E. Haas: *Our values are an important part of our self-concept. Values are decisions about the worth of something based on a standard we have set. When an individual decides something has value, he decides it is worthwhile. The standards we set in determining value are morals. Morals are our judgments of rightness and wrongness. Something that is judged as right will be valued.*[74]

Meglino dan Ravlin (1998) mendefinisikan nilai sebagai keyakinan tentang diinternalisasi sesuai perilaku, ini dampak (antara lain) bagaimana seorang individu menafsirkan informasi. Para penulis melakukan kajian komprehensif dari literatur dan mengusulkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi ada nilai penelitian, menunjukkan sifat literatif nilai-nilai dan cara bahwa nilai-nilai dapat mempengaruhi baik persepsi dan perilaku.[75] Sedangkan Rokeach mendefinisikan konsep nilai sebagai *"an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable …"*.

Sedangkan menurut Hasan: "Nilai dalam konsep pendidikan ilmu sosial, nilai adalah sesuatu yang menjadi kriteria apakah suatu tindakan, pendapat atau hasil kerja itu baik atau tidak".[76]

---

73 Djahiri, K. A.,. *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral VCT dan Games dalam VCT*, (Bandung: Gramedia).1985.hlm.20

74 Sunal, C. Z. and Haas, M. E. (1993).*Social Studies and The Elementary/ Middle School Student*, (New York: Holt Rinchart and Winston. Inc.). 1993.hlm.231

75 Meglino, Ravlin, *Individual values in organizations: concepts, Controversies and Research*, Management 24.1998. (3), hlm. 351–389.

76 Hasan, H. S.. *Pendidikan Ilmu Sosial.* (Jakarta: Ditjen Pendidikan tinggi Depdikbud). 1996.hlm114

Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal benar, baik, dan diinginkan. Para peneliti bidang perilaku organisasi sudah lama memasukkan konsep nilai sebagai dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Individu yang memasuki suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang "seharusnya" dan apa yang "tidak seharusnya" terjadi. Hal ini selanjutnya menimbulkan implikasi pada perilaku atau hasil-hasil tertentu yang lebih disukai dari yang lain. Dengan kata lain, nilai menutupi objektivitas dan rasionalitas

Jadi, dapat dipahami bahwa nilai adalah seperangkat keyakinan yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak tentang kebenaran, kesalahan, keindahan dan pilihan ini akan menjadi identitas pribadinya.

2. Nilai dalam Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter, perhatian Lickona terhadap nilai-nilai karakter dan pengembangannya telah menjadi kajian dalam beberapa tahun terakhir. Lickona berfokus kepada bagaimana menerapkan nilai-nilai karakter dari hal-hal yang sangat sederhana yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang sangat besar dimasa yang akan datang bagi setiap individu yang mampu melaksanakan nilai-nilai karakter itu sendiri dengan baik. Sebagaimana contoh-contoh sederhana yang dikemukakan oleh Lickona yang memberikan dampak dan pemahaman yang sangat mendalam mengenai implementasi nilai-nilai karakter, *"We don't want them to lie, cheat on tests, take what's not theirs, call names, hit each other, or be cruel to animals; we do want them to tell the truth, play fair, be polite, respect their parents and teachers, do their schoolwork, ad be kind*

to others[77]. Dapat dijelaskan bahwa dengan mengutamakan nilai kejujuran, tentu siswa diminta untuk tidak mencontek saat mengerjakan tugas atau ujian, tidak mengambil barang yang bukan haknya, memanggil dengan panggilan yang baik, menyayangi teman, dan memperlakukan hewan dengan baik. Dengan demikian, jelas bahwa kita menginginkan agar peserta didik kita berkata jujur (tidak bohong), adil, sopan santun, menghormati orang tua dan guru, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh guru, dan bersikap baik kepada setiap orang.

Karakter menurut Lickona terbagi atas beberapa bagian yang tercakup didalamnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lickona di bawah ini: *Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior. Good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good, habits of the mind, habits of the heart, and habits of action. All three are necessary for leading a moral life, all three make up moral maturity. When we think about the kind of character we want for our children, it's clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation from within.*[78]

Berdasarkan pendapat Lickona di atas dapat dijelaskan bahwa karakter terdiri atas tiga korelasi antara lain *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior.* Karakter itu sendiri terdiri atas, antara lain: mengetahui hal-hal yang baik, memiliki keinginan untuk berbuat baik, dan melaksanakan yang baik tadi berdasarkan atas pemikiran, dan perasaan apakah hal tersebut baik untuk dilakukan atau tidak, kemudian dikerjakan. Ketiga hal tersebut dapat memberikan pengarahan atau pengalaman

77 Lickona, Thomas. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. (New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books). 1991.hlm.47

78 ibid. hlm.51

moral hidup yang baik, dan memberikan kedewasaan dalam bersikap.

Sedangkan John Dewey adalah filosuf yang meletakkan dasar pendidikan karakter yang diterima bahkan ditiru diberbagainegara,misalnyadiIndonesia.MenurutHidayatullah pendidikan karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlaq atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain.[79] Sapriya menerangkan nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain; nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain.[80] Pendidikan karakter telah diletakkan sebagai dasar penting penyusunan dalam penyusun kurikulum pendidikan nasional. Dimulai dengan meletakkan pendidikan karakter pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2010 untuk meningkatkan karakter peserta didik sesuai dengan bidang studi yang diajarkan.

Dalam konteks Indonesia, di sini penulis akan mengemukakan beberapa hasil penelitian tentang penerapan pendidikan karakter baik di sekolah maupun perguruan tinggi, baik melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Nilai-nilai Pancasila, pembelajaran bidang studi Aqidah Akhlaq di madrasah. Supardan menerangkan bahwa satu tamparan lagi bagi dunia pendidikan kita yang makin marak sekarang ini adalah marebaknya bahaya kekerasan, oleh karena itu dalam hal ini perlu keserasian dan konsistensi nilai yang dibudayakan, artinya ucapan harus sesuai dengan perbuatan.[81] Sedangkan Al-Muchtar dalam dunia pendidikan proses akulturasi dan perubahan perilaku menjadikan masyarakat

79 Sugiyanto, *Desain Model Pembelajaran Karakter, Teoridan Praktikdalam IPS Terpadu,(*Surakarta: Yuma Pustaka).2013.hlm.22

80 Sapriya. *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*. (Bandung: PT. RemajaRosdaKarya). 2012.hlm.55

81 Supardan, D. (2015). *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Perspektif Filosofi dan Kurikulum*.(Jakarta: BumiAksara).2015.hlm.425

memasuki *"complex adaptif system"*. Krisis multidimensional mempengaruhi pembangunan material dan spiritual bangsa. Terkesan seolah tersendat, *"discontinue, unlinier and unpredictable."* Dalam keadaan seperti ini seringkali tampak perilaku masyarakat menjadi lebih korup ketika terdapat kesempatan.[82] Dengan demikian, pendidikan karakter diperlukan untuk mengatasi bahaya kekerasan tersebut Berikut ini pembahasannya:

Nurfalah, Farida & Kurniawati, Indah, didalam jurnalnya menjelaskan *Character Education Communication Model Nation to Form the Integrity of Self in Students,*Pembentukan identitas diri dapat dibangun melalui pembentukan karakter yang diterapkan pada setiap aspek pendidikan, identitas seseorang lebih ditentukan oleh tindakan dan karakter orang tersebut.[83]

Prinsip model komunikasi pembangunan pendidikan dalam membentuk karakter integritas bangsa di siswa adalah:

1. Mengembangkan kebiasaan, perilaku dan sikap toleransi antar agama, ras, etnis, pendapat, sikap dan tindakan terhadap orang lain yang berbeda dengan dia.
2. Mengembangkan sikap dan perilaku mandiri tidak selalu bergantung pada orang lain dalam bukunya kehidupan sehari-hari dan disiplin.
3. Mengembangkan sikap dan tindakan yang menunjukkan rasa menyenangkan, bicara, hang out, dan bekerja sama dengan orang lain.

---

82 Al-Muchtar,S. *Inovasidan Transformasi Pembelajaran Pendidikan IPS*. (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri). 2014.hlm.iii.

83 Nurfalah, F. &Kurniawati, I, Character Education Communication Model Nation to Form the Integrity of Self in Students,*Asian Journal of Humanities and Social Sciences (*AJHSS), 3, (1). 2015. hlm. 151-162.

Nurdin, Syarief, Encep , *The Policies on Civic Education in Developing National Character in Indonesia*:[84]

Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda pada pelaksanaan Civic Education. Sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia mengelola Civic Education secara terpisah melalui subjek khusus di bawah nama 'pendidikan Kewarganegaraan', sementara negara-negara lain, seperti Malaysia, mengintegrasikan bentuk pendidikan ke dalam mata pelajaran lain. Kebijakan Pendidikan Civic di Indonesia bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme (Penjelasan Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2003).

Sedangkan pendidikan karakter yang dikaitkan dengan Pancasila, seperti yang disampaikan oleh Amir, Syafruddin, dalam jurnalnya yang berjudul *"Pancasila As Integration Philosophy of Education And National Character:"* [85]

Pengaruh ideologi neo-liberalisme dengan seperangkat nilai-nilai seperti individualisme, materialisme, sekularisme, hedonisme, rasionalisme, materialisme, tingginya budaya konsumerisme dan pengaruh budaya pasar dengan nilai-nilai kapitalisme telah memukul identitas nasional Indonesia dengan kehidupan politik yang demokratis, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia hampir melupakan nilai-nilai budaya lokal sendiri dan agama yang kami percaya. Akibatnya, nilai-nilai dan kearifan lokal tidak memberi warna pendidikan Indonesia. Namun, lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat dibandingkan dengan masyarakat Eropa dan Amerika Serikat sekalipun. Penulis mencoba untuk menyajikan "Integritas Filsafat Pancasila Sebagai Pendidikan Karakter

84 Nurdin, S, E,The Policies on Civic Education in Developing National Character in Indonesia, *International Education Studies*; 8.(8). 2015.hlm. 199-209.

85 Syafruddin, A. *Pancasila As Integration Philosophy of Education And National Character, International Journal Of Scientific & Technology Research*, 2, (1). 2013. hlm. 54-57.

Bangsa Indonesia" yang diharapkan dapat memberikan solusi terbaik untuk pendidikan di Indonesia lebih diwarnai oleh nilai-nilai parsial, tidak terintegrasi, yang akan dipresentasikan oleh beberapa ahli pendidikan di Indonesia.

Hasilnya menunjukkan bahwa:

1. Sebagai komponen integral dari bangsa ini kita harus setuju bahwa Pancasila adalah konsep revolusioner yang peradaban maju, terutama untuk Indonesia, Pancasila membentuk karakter dan identitas bangsa yang besar, modern, bermartabat dan beradab.
2. Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi semangat setiap denyut nadi kehidupan warga dan kegiatan konstitusional, karena Pancasila dipandang sebagai akulturasi media di berbagai pemikiran parsial pada agama, pendidikan, budaya, politik, sosial dan bahkan ekonomis. Jadi dengan membuat filsafat Pancasila sebagai bangsa, kita dapat mewujudkan nasionalisme Indonesia.

Sedangkan implementasi pendidikan karakter di sekolah, yaitu di di MTsN Pacitan dan SMPN 1 Pacitan dapat dilihat pada hasil penelitian yang diungkapkan oleh Maryono,dalam penelitiannya *The Implementation Of Character Education Policy At Junior High Schools And Islamic Junior High Schools In Pacitan,* Hasil penelitian menunjukkan bahwa:[86]

1. kegiatan perencanaan dalam pendidikan karakter berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah 'melibatkan guru, siswa, dan komite sekolah, dan kemudian akan menjadi program kepala sekolah;
2. sosialisasi dilakukan oleh kepala sekolah dan para guru. Sasaran sosialisasi adalah semua anggota sekolah dan

86 Maryono, T*he Implementation Of Character Education Policy At Junior High Schools And Islamic Junior High Schools In Pacitan, International Journal of Education and Research,* 3 (5). 2015. hlm. 267-274.

komite oleh beberapa kegiatan dan beberapa cara tertulis;

3. internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter menggunakan pendekatan semi-luas, mereka adalah: (a) oleh pelajaran terpadu, dan (b) program ekstra kurikuler;
4. monitoring dan evaluasi dalam karakter implementasi pendidikan adalah: (a) sistem manajemen partisipasi (melibatkan semua sekolah komponen), (b) dengan cara akademik (laporan siswa).

Sedangkan menurut Dwiyani dan Sagirani, menerangkan bahwa Metode penanaman pendidikan karakter berdasarkan klasifikasi tipe kepribadian ini diyakini dapat menghasilkan perbaikan pada karakter bangsa, terutama pada generasi muda Indonesia. Jika ini yang dilakukan terus menerus, diharapkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia dapat hadir Emas Generasi pada peringatan 100 th Republik Hari Kemerdekaan Indonesia.[87]

Kamaruddin, A. Syamsu, dalam penelitiannya *"Character Education and Students Social Behavior",* Dalam lingkungan pendidikan, dalam bentuk program pendidikan karakter yang telah dilakukan baik secara formal dan informal. Pendidikan karakter penting bagi pertumbuhan individu manusia secara keseluruhan dan harus dilakukan sejak dini. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendidikan moral (pendidikan yang bermoral) untuk siswa dan juga membangun budaya masyarakat untuk nilai-nilai moral.[88]

---

87 Dwiyani dan Sagirani, *Inculcation Method of Character Education Based on Personality Types Classification in Realizing Indonesia Golden Generation, International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE),* 3 (2). 2014. hlm. 91-98.

88 Kamaruddin, A. Syamsu, *Character Education and Students Social Behavior, Journal Educatian and Learning,* 6 (4). 2012. hlm.15-24.

Pada pendidikan madrasah kita mengenal bidang studi tentang tingkah laku dan keimanan yaitu Aqidah Akhlaq, pada penelitian Sutomo, Imam yaitu *"Modification of character education into akhlaq education for the global community life":* mngungkapkan bahwa istilah "pendidikan karakter" tampaknya menjadi gerakan besar-besaran di dunia sebagai perhatian untuk membangkitkan generasi anak-anak yang memiliki karakter moral yang kuat. Semua lembaga pendidikan dasar dan menengah mensosialisasikan pendidikan karakter, termasuk Indonesia sejak tahun 2010. Dunia Islam menggunakan istilah khusus "**Pendidikan Akhlaq** ". Ini telah terjadi sepanjang sejarah peradaban Islam dan telah berhasil membudidayakan karakter Muslim. Inti dari pendidikan akhlaq adalah dalam pemurnian spiritual dan ketaatan kepada Allah.[89]

Penelitian dari berbagai negara Islam menunjukkan bahwa model pendidikan akhlaq tidak banyak berubah. Hal ini dilestarikan dari generasi ke generasi, yang membuatnya jauh di belakang kecanggihan pendidikan karakter. Orang muslim tampaknya tidak disiapkan dengan karakter yang memadai untuk berbaur dengan masyarakat global. Pelaksanaan pendidikan akhlaq membiarkan siswa memahami kehidupan yang damai hanya di lingkungan mereka. Karena semua orang menggunakan ilmu dari Barat dan teknologi, umat Islam juga beradaptasi dengan fenomena ini dan mengambil manfaat untuk memfasilitasi kebutuhan mereka.

Format pendidikan karakter sebagai instrumen kebutuhan untuk dimodifikasi menjadi pendidikan akhlaq, sehingga siswa tidak terkunci ke dalam wawasan lokal sempit dan dapat mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat global. Modifikasi ini meliputi:

---

89 Sutomo, I, (2014), *Modification of character education into akhlaqeducation for the global community life,Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 4, (2). 2014. hlm. 291-316

1. mengadopsi isi dari pendidikan karakter untuk komunitas global,
2. memberikan wawasan untuk peran guru dan lembaga pendidikan,
3. berbagai model pembelajaran,
4. melibatkan orang tua dan masyarakat, dan
5. menampung mahasiswa dari berbagai agama.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: pendidikan karakter saat ini mendominasi bidang praktek dalam pendidikan moral; sekarang menjadi model di sekolah-sekolah untuk mempersiapkan generasi yang baik. Pengembangan pendidikan karakter kompatibel dengan pendidikan akhlaq dalam rangka mempersiapkan siswa untuk hidup damai dalam komunitas global. Adaptasi tidak akan mengganggu keyakinan Islam dasar; karena itu Muslim harus terbuka untuk kemungkinan modifikasi pendidikan karakter dalam pendidikan akhlaq.

Tujuan pendidikan karakter adalah :

1. Mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal, dan tradisi budaya bangsa Indonesia yang religius.

Adapun 18 karakter yang harus dimiliki oleh siswa sebagai berikut.

1. **Religius** : sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2. **Jujur** : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. **Toleransi** : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. **Disiplin** : Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5. **Kerja Keras** : Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. **Kreatif** : Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. **Mandiri** : Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
8. **Demokratis** : Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain
9. **Rasa Ingin Tahu**: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. **Semangat Kebangsaan**: Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya
11. **Cinta Tanah Air** : Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. **Menghargai Prestasi**: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna

bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13. **Bersahabat/Komunikatif**: Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. **Cinta Damai** : Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. **Gemar Membaca**: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. **Peduli Lingkungan**: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi
17. **Peduli Sosial** : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. **Tanggung-jawab**: Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Pengembangan nilai ini pada tahap praktik melalui pengembangan konatif yakni adanya pemahaman tentang nilai sekaligus kemauan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasan menjelaskan: "Konatif adalah kualitas yang menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman, kemampuan kognitif tinggi, sikap, nilai, dan moral tetapi ia juga memiliki keinginan untuk

melaksanakan dan membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa konatif adalah pelaksanaan yang riil dari apa yang sudah jadi miliknya".[90]

Siswa yang belajar IPS di SMP tidak hanya senang belajar ilmu-ilmu sosial dan mau mempelajari ilmu-ilmu sosial lebih lanjut, tetapi belajar ilmu-ilmu sosial diwujudkannya dalam kebiasaan belajar sehari-hari. Mereka yang menyenangi kejujuran tidak saja hanya ingin melakukan kejujuran tetapi juga memang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari di sekolah, kelompok bermain ataupun masyarakat.

Lebih lanjut Hasan menjelaskan: "tujuan konatif untuk pendidikan ilmu-ilmu sosial antara lain: a) sikap dan kehidupan yang religius, b) melaksanakan tugas-tugas sosial, c) melaksanakan tanggung jawab pribadi, d) bekerja keras, e) bekerja dengan jujur, f) kemampuan beradaptasi.

B. Kearifan Lokal

Pengertian secara umum, *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.[91]

Menurut Wagiran (2012), kearifan lokal paling tidak menyaratkan beberapa konsep, yaitu: (1) kearifan lokal adalah sebuah pengelaman panjang, yang diendapkan sebagi petunjuk perilaku seseorang; (2) kearifan lokal tidak terlepas dari lingkungan pemiliknya; dan (3) kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya.[92] Dalam perkembangan karifan lokal tidak selalu

---

90 Hasan, H. S.,. *Pendidikan Ilmu Sosial.* (Jakarta: Ditjen Pendidikan tinggi Depdikbud). 1996.hlm.117

91 Sartini, N. W. *Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa). Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra,* 5. 2009. hlm. 28-37.

92

kaku. Sebagai alat dan konsep kearifan lokal melekat sejala dengan proses perkembangan sosial manusia sesuai konteks sosio-kultural yang melatarinya faktor historis. Sehingga kearifan lokal sebenarnya selalu ada di dalam setiap realitas masyarakat, melekat dalam sistem tatanan nilai norma tradisi lokal.[93]

Kearifan lokal *(Local Wisdom)* yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales (1948-1949), seorang sarjana Arkeologi, yang menyebutnya dengan istilah *local genius.* Meskipun selanjutnya dikembangkan oleh F.D.K. Bosch seorang arkeolog klasik. Quaritch Wales, menjelaskan *"the sum of the cultural characteristics which the vast majority of people have in common as a result of their experience in early life".*

Menurutnya local genius adalah kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kebudayaan itu berhubungan. Akibatnya terjadilah suatu proses akulturasi, di mana kebudayaan setempat menerima pengaruh kebudayaan asing. Pengertian ini diperoleh dari pengamatannya atas hubungan yang terjadi pada waktu kebudayaan Indonesia menerima pengaruh dari kebudayaan India.

Himawan, menerangkan bahwa *"Local wisdom of the people around the tin mines can be synchronized based on the knowledge of local communities in developing a policy for managing former mine lands in order to increase the welfare of people around those lands".*[94]

Kuasa, dkk.menjelaskan: *"Local wisdom as well to the retention of agricultural tradition and the compliance of local food*

---

93 Sutarto, D. (2016), Kearifan Budaya Lokal Dalam Pengutan Tradisi Malemang Di Tengah Masyarakat Modernisasi Di Sungai Keruh Musi Banyuasin Sumatera Selatan, *Jurnal dimensi*, 5(3). Hlm. 1-15

94 Himawan, W. dkk. *Local Wisdom from the Socio Ecological Perspectives: Managing Former Mine Lands in Achieving Green Era IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS).* 19 (12. 2014.hlm. 52-57.

from natural resources in the surrounding. It is important to assess he kinds of local wisdoms and their existences.[95]

Menurut Sudarmin dan Pujiastuti menerangkan:*"Local wisdom in Karimunjawa is very interesting, because a lot of people Karimunjawa islands have implemented various conservation behavior patterns of marine life, coral reefs, flora, and fauna in his life."*[96]

Setiyadi, menjelaskan: *"…The expressions implied in the song are spreading tthe expressions are said to be the Javanese local wisdom because it is Javanese who can understand the meaning of the expressions and reflect them in everyday life".*[97]

Dahliani, Soemarno, dan Setijanti. menjelaskan: *Local wisdom is culture resulted from human thought processes to adjust its existence in natural surroundings which can be manifested in his works tangibly as the built environment and intangibly. Local wisdom is always changing, because it follows the culture dynamics and it cannot be separated from the human mindset. The most important thing is to selectively accept outside influences so that local knowledge can be maintained in accordance with the place.*[98]

Kongprasertamorn, menjelaskan: *"local wisdom is presented in many forms, through people's thoughts, occupations, ways of living, and social values. The problem is that local wisdom usually is not officially published and promoted. As a consequence,*

---

95 Kuasa, W, dkk. *Local Wisdom Of Farmers In Meeting Of Local Food, IJSTAS,* 2 (1). 2015. hlm. 53 - 60

96 Sudarmin dan Pujiastuti, S.E. *Scientific Knowledge Based Culture and Local Wisdom in Karimunjawa for Growing Soft Skills Conservation, International Journal of Science and Research (IJSR).* 4 (9). 2015. hlm. 15-23

97 Setiyadi, D. B. P. *Discourse analysis of serat alat idha: javanese Cognition system and local wisdom. Asian Journal of Social Sciences & Humanities*, 2 (4). 2013. hlm.292-300.

98 Dahliani, Soemarno, I. dan Setijanti, P. *Local isdom In Built Environment In Globalization Era. International Journal of Education and Research.* 3 (6). 2015. hlm. 160-186

it is difficult for the public to learn about and use this kind of knowledge".[99]

Dari berbagai pemaparan tentang kearifan lokal diatas, dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, kearifan lokal dijadikan sebagai wadah utama didalam mengimplemntasikan hasil pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial tersebut. Didalam kearifan lokal Pemanfaatan akal budi manusia menurut Nursid Sumaatmadja menjelaskan bahwa manusia dapat memanfaatkan dan mengembangkan akal budinya *(homo sapiens)*[100]. Pemanfaatan dan pengembangan akal budi ini telah terungkap pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan ini telah merubah cara berfikir manusia dalam memahami kebutuhan hidupnya. Perkembangan dan kemajuan teknologi telah menjadi tulang punggung pembangunan. Kedua aspek sosial budaya inilah yang telah menjamin kelestarian hidup manusia di permukaan bumi.

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah sebagian bentang alam menjadi bentang budaya, hutan, gunung, rawa, air terjun dan lainnya telah dimanfaatkan untuk pemukiman, kawasan pertanian, kawasan industri, pembangkit tenaga listrik yang dapat menjamin kelangsungan hidup manusia. Melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai potensi sumber daya telah diubah menjadi kekayaan baik sosial ekonomi maupun sosial budaya.

Lingkungan hutan merupakan sumberdaya alam yang erat kaitannya dengan kehidupan umat manusia, penting dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-

---

99 Kongprasertamorn, K. *Local Wisdom, Environmental Protection And Community Development: The Clam Farmers In Tambon Bangkhunsai, PhetchaburiProvince, Thailand, MANUSYA: Journal of Humanities* 10 (1). 2007.hlm. 1-8.

100 Sumaatmadja, N. *Pengantar Studi Sosial*, (Bandung: Alumni) 1986. hlm.3

besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sifat hutan yang khas dengan keanekaragaman komponen penyusunnya, memiliki keragaman peluang pemanfaatan untuk kepentingan antar generasi dengan siklus usaha yang panjang, yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum.

Pengelolaan lingkungan hutan mempunyai karakteristik yang tidak dapat disamakan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam lainnya, karena disamping untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, juga harus memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, sehingga tidak mengubah fungsi pokoknya, meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam pengelolaan hutan agar ketiga fungsi tersebut dapat berjalan secara simultan, sebagai pendukung dalam pembangunan ekonomi melalui produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, perlindungan wilayah melalui konservasi tanah dan air serta pelestarian keanekaragaman hayati guna kepentingan jangka panjang bagi generasi sekarang dan mendatang.

Hal ini diperkuat dengan pengalaman pengelolaan selama kurun waktu tahun 1980-an sampai 2000-an dimana kebijakan pembangunan lebih berorientasi pada produksi kayu. Walaupun di era tersebut sektor kehutanan memberikan sumbangan devisa negara yang cukup besar bagi Pembangunan Nasional, namun karena kebijakan yang kurang tepat tersebut menyebabkan kondisi hutan berada pada posisi sangat mengkhawatirkan.

Menurut Balai KPHL Rinjani Barat (2012. Hlm. 2) Berdasarkan data analisis kementerian kehutanan, laju deforestasi hutan 1985 - 1997 adalah seluas 1,8 juta ha/tahun, kemudian meningkat pada periode 1997 – 2000 menjadi 2,8 juta ha/tahun, dan menurun lagi pada periode 2000 - 2005 sebesar

1,08 juta ha/tahun.[101] Kondisi hutan yang kritis tersebut di atas, akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan umat manusia dan lingkungannya dengan meningkatnya frekuensi banjir dan tanah longsor, pemanasan global, serta perubahan iklim yang sulit diprediksi. Upaya-upaya pembangunan terus dilakukan untuk menekan laju kerusakan hutan tersebut, hingga kondisi hutan dapat berfungsi secara optimal. Berbagai kebijakan dari pemerintah pusat telah diluncurkan dengan harapan akan terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat serta sekaligus mengakomodasikan tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah.

Selama ini ekploitasi hutan yang berlebihan terus terjadi dan mengganggu keseimbangan alam, misalnya eksploitasi hutan mengakibatkan banjir dan longsor, pembukaan hutan menjadi lahan ladang baru dengan pembakaran hutan telah mencemari udara dibeberapa wilayah di Sumatera, misalnya: Pekanbaru Riau maupun Jambi. Dalam hal ini Nana Supriatna menjelaskan bahwa: Eksploitasi terhadap alam merupakan sebuah praktik yang berangkat dari cara pandang *anthropocentris*, merupakan sebuah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat penentu kehidupan di muka bumi.[102] Pandangan ini menjadi sebuah pembenaran bagi manusia untuk melakukan hegemoni sebagai master perancang pengelola alam agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pandangan ini juga mengenyampingkan peran alam dalam mengatur keseimbangan dirinya sehingga keberlangsungannya diintervensi oleh manusia. Akibat intervensi ini maka tidak heran terjadi banyak kerusakan yang bermuara pada bencana alam.

---

101 Balai KPHL Rinjani Barat. *Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) Jangka Panjang KPHL Rinjani Barat Periode 2012-2021*. 2012. hlm.2

102 Nana Supriatna. *Ecopedagogy, Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya). 2016. hlm.110

Cara pandang *anthropocentris* tidak lagi relevan karena manusia bukan semata pengendali kehidupan di planet ini. Lebih lanjut Nana Supriatna menjelaskan: Perlu adanya perubahan cara pandang dari *anthropocentris* ke *ecocentris* yaitu pandangan yang menempatkan alam dengan segala isinya sebagai pusat. Manusia hanyalah bagian dari alam dan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesinambungan atau keberlangsungan hidup. Dalam pandangan ini, manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam tempatnya tinggal.[103]

Sedangkan Capra, mengungkapkan: Perlunya perubahan paradigma, yaitu bahwa konsep-konsep baru dalam Fisika telah menimbulkan perubahan mendalam dalam pandangan dunia kita; dari pandangan dunia mekanistik yang berasal dari Descartes dan Newton menjadi suatu pandangan holistik, ekologis. Holistik artinya memandang dunia sebagai suatu keseluruhan, sedangkan ekologis artinya mengakui kesalingtergantungan fundamental semua fenomena dan fakta bahwa sebagaimana individu dan masyarakat kita sekalian terlekat dalam (dan bergantung secara mutlak pada) proses siklus alam.[104]

Keraf dalam analisis dampak lingkungan dengan paradigma holistik-ekologis, "…harus bersifat komprehensif, yakni aspek sosial, budaya, moral (nilai), estetis dan spiritual."[105] Ini artinya masyarakat belum memahami sepenuhnya akibat dari perbuatan mereka karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, lalu bekerja dengan mengambil jalan pintas atau mengambil cara mudah untuk memenuhinya yakni misalnya dengan membakar hutan tanpa memperdulikan kelestarian alam. Alasan mempelajari masyarakat "tradisional" yaitu

---

103 Ibid. hlm.114

104 F. Capra. *Jaring-jaring Kehidupan, Visi Baru Epistimologi dan Kehidupan*. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru). 2002. hlm.14

105 Keraf, A. S. *Etika Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Gramedia). 2010. hlm.354

karena keunikan memelihara cara berpakaian, berbicara, kesantunan dan perlakuan orang tua kepada anak. Demikian pula mereka mempertahankan ciri-ciri cara hidup nenek moyang selama beribu-ribu tahun untuk kelestarian alam mereka.[106] (Diamond, 2015, hlm. 8).

Kelestarian ekologis dapat dilakukan dengan membangun kecerdasan ekologis, Supriatna) menguraikan bahwa: Kecerdasan ekologis yang dimiliki seorang individu didasari atas pengetahuan, kesadaran dan keterampilan hidup selaras dengan kelestarian alam. Seseorang yang cerdas secara ekologis adalah orang yang memahami bahwa setiap perilaku dan tindakannya tidak hanya berdampak pada dirinya dan orang lain melainkan juga pada lingkungan alam tempat dia tinggal. Kecerdasan tersebut dibangun oleh pemahaman bahwa alam tempat dia tinggal harus dijaga agar tetap memiliki daya dukung bagi kehidupan dirinya dan orang lain.[107]

Salah satu strategi yang ditempuh untuk dapat mewujudkan keberlanjutan dari fungsi dan peranan hutan adalah dukungan kebijakan yang tepat melalui penerapan pengelolaan hutan dengan pendekatan ekosistem. Kebijakan pengelolaan dengan pendekatan ekosistem merupakan kebijakan pengelolaan yang mengedepankan keseimbangan ekosistem, di mana pola pengelolaan lebih berorientasi pada proses yang melihat keragaman dari elemen pembentuk hutan.

Pergeseran paradigma pengelolaan dari pengelolaan yang mengedepankan produksi utama hutan berupa kayu *(timber based management)* ke pengelolaan berbasis ekosistem ini didasarkan pada kondisi sumberdaya hutan yang semakin

106 J. Diamond. *The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin) Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia). 2015. hlm.8

107 Supriatna, N. (2016). *Ecopedagogy, Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya). 2016. hlm.24

hari fungsinya semakin menurun dan semakin dipahaminya bahwa nilai manfaat yang dihasilkan dari keberadaan hutan dengan kondisi yang baik jauh melebihi nilai hasil hutan kayu yang selama ini menjadi hasil utama yang diekstrak dari hutan. Di sisi lain, masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencaharian sekaligus menjaga kelestariannya dengan konservasi dan menerapkan kearifan lokal yaitu *awik-awik* desa yang sudah disepakati, memberdayakan masyarakat setempat dengan berkelanjutan *(sustainability)*.

Dalam sejarah Indonesia, budaya kita bukan karena atau hanya pengaruh dari luar atau negara lain, tetapi bangsa Indonesia mempunyai keterampilan dan intelektual lokal asli (*local genius*) yang sebenarnya tidak kalah dibanding dengan kebudayaan bangsa lain.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia sebagai *"Local genius"* yang berbeda dengan pengaruh dari kebudayaan India, Cina, Arab, maupun Eropa atau Dunia Barat. Itu kesimpulan atau analisa yang salah, sebab Indonesia telah mempunyai teknologi tersendiri yang tak kalah maju dengan bangsa lain. Contoh: Bangunan Candi Borobudur, Prambanan, dan sebagainya, Astonomi dan pelayaran bangsa Bugis dan Makasar, Rumah-rumah adat atau daerah yang tahan gempa, Sistem Tulisan dan bahasa asli dari suku-suku bangsa di Indonesia.

Dalam disiplin antropologi *"local wisdom"* dikenal istilah *"local genius"*. Kemudian para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini, antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan

mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.[108]

Keraf menyebut *local genius* dengan istilah lain yaitu kearifan tradisional, "Kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.[109]

Menurut Singsomboon *"Local wisdom is the knowledge of the provincial gained through their experience and initiation as well as those one that has been passed down from generation to generation…"*[110] Mungmachon menyebutkan: *'community which is accumulated and passed on. This wisdom can be both bstract and concrete, but the important characteristics are that it comes from experiences or truth gained from life...'.*[111]

Menurut Marsono Dapat ditemukan kearifan lokal disetiap kelompok etnis Nusantara. Pada saat Nusantara bangsa tidak bisa menulis sebuah tulisan, mereka menempatkan kebijaksanaan lokal mereka dalam bentuk ritual tradisional, legenda, cerita rakyat, cerita lisan, ekspresi, dan bantuan, kemudian mereka tulis. Sehubungan dengan 'budaya', kearifan lokal merupakan bagian dari budaya yang abstrak. kearifan lokal juga bisa menjadi simbol. Simbol dapat berarti "baik, "positif", "tidak baik", "negatif". Di Indonesia, kearifan lokal

---

108 Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa"Local Geniu".*(Jakarta: Pustaka Pelajar). 1986. hlm.18-19

109 Keraf, A. S. *Etika Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Gramedia). 2010. hlm.*369*

110 T. Singsomboon. *Tourism promotion and the use of local wisdom through creative tourism process. International journal of business tourism and applied sciences,* 2 (2). 2014. hlm. *32-37*.

111 R. Mungmachon. *Knowledge and local wisdom:community treasure. International Journal of Humanities and Social Science,* 2 (13). 2012. hlm. 174-181.

jelas memiliki makna positif karena 'kebijaksanaan' selalu berarti 'baik atau positif'.[112]

Sedangkan Pusat Penelitian Folklore (2007) telah merangkum definisi. "Kearifan lokal menjadi 4 jenis: 1) kearifan lokal merupakan abstrak dan berhubungan dengan agama, 2) kearifan lokal merupakan potensi yang melindungi masyarakat, 3) kearifan lokal adalah tubuh pengetahuan dan 4) kearifan lokal merupakan modal intelektual".

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat diuraikan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan Tuhan, manusia dan alam, kemudian menjadi tradisi untuk memelihara dan melindungi dirinya dari pengaruh luar, kemudian tradisi ini diwariskan secara turun temurun.

112 Marsono. *"Revitalisasi Kearifan Lokal Guna Mewujudkan Masyarakat Sejahtera" Jurnal Kemajuan Terkini*, 2 (5). 2007. hlm.182

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

Al-Muchtar, S. *Inovasidan Transformasi Pembelajaran Pendidikan IPS*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri. 2014.

Ayatrohaedi. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.1986.

Baharuddin. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Kurniakalam Semesta. 2010.

Banks, J. A. *Teaching Strategies for The Social Studies.* New York: Longman 1990.

Barr, R.D, Barth, J.L, Shermis, S.S. *Definiting the social studies.* Washington DC: NCSS. 1977.

Brophy J. dan Alleman. J., *Research in Social Studies Education*, New York: Routledge, 2008.

Bruning, Scraw, Norby dan Roning, *Creativity in Science: Tensions between Perception and Practice.* 2004.

Ayatrohaedi. *Kepribadian Budaya Bangsa"Local Genius"*. (Jakarta: Pustaka Pelajar). 1986.

Capra, F. *Jaring-jaring Kehidupan, Visi Baru Epistimologi dan Kehidupan.* Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.2002.

De Kock, Sleegers, dan Voeten, new learning and the classification of learning environments in secondary education. 2004

Diamond, J..*The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin) Apa yang Dapat Kita Pelajaridari Masyarakat Tradisional.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.2015.

Djahiri, K. A.. *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral VCT dan Games dalam VCT*, Bandung: Gramedia.1985.

Fogarty, Robin. 1991. How to Integrated the Curricula. Palatine, Ilinois: IRI/ Skylight Publishing, Inc.

Gillin, J.L dan J.P. Gillin, *Cultural Sociology*. New York: The Me Millan Co.1954

Goleman, D. *Ecological Intelligence: Mengungkap Rahasia di Balik Produk-produk yang Kita Beli*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2010.

Hasan, H. S., *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Ditjen Pendidikan Tinggi Depdikbud.1996.

Jarolimek, J.. *Social Studies in Elementary Education, Seventh Edition*. New York: Macmillan Publishing Co. 2002.

Johnson, E.B.. *Contextual Teaching and Learning*. California: Corwin Press Inc. 2002.

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. *Models of Teaching (eight edition)* (Penerjemah: AchmadFawaid). Yogyakarta: PustakaPelajar.2009.

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*, Yoyakarta: Paradigma.2004

Kenzie, M.N.. *A Guide to the Social Sciences*.USA :The New American Libtary.1966.

Keraf, A. S.. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia. 2010.

Killen. .*Effective Teaching Strategies. Australia*. Social Science Press.1997.

Kincheloe, J.L.. *Explorations of Educational Purpose 1, Knowledge and Critical Pedagogy,* Canada: Springer and Business Media B.V.2008.

Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi Sosialdan Budaya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka. 1986.

Komalasari, Kokom. *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*. Bandung: PT ReflikaAditama. 2014.

Lickona, Thomas. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books.1991.

Maxim, George W. (2010). Dynamic Social Studies for Constructivist Classrooms. United States of America: Linda Cox.

NCSS. *Charting a course: Social studies for the 21st century: A report of the curriculum task force of the national commission on social studies in the schools.* Washington: NCSS.1979.

Ohmae, K. *The Rise of the Region State*, 1993

Rusman. *Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru,*Jakarta: Rajagrafindo Persada.2012.

Sapriya. Dr. *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2012.

Savage, T. V. & Amstrong, D. G. *Effective Teaching In Elementary Social Studies* (*third edition*). New Jersey: Prentice Hall.1996.

Setiadi, E, M. danKolip, U.. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya,* **Jakarta; Kencana. 2011.**

Soekanto, S,. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.2012.

Somantri, M. N,. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2001.

Sugiyanto. *Desain Model Pembelajaran Karakter, Teoridan Praktik dalam IPS Terpadu,* Surakarta: Yuma Pustaka.2013.

Sunal, C. Z. and Haas, M. E.. *Social Studies and The Elementary/ Middle School Student*, New York: Holt Rinchart and Winston. Inc. 1993

Supardan, D.. *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Perspektif Filosofi dan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.2015.

Supardan, D.. *Manusia, Kekerasan, Multikultural dan Transformasi Pendidikan*, Bandung: Rizqi Press. 2015.

Supriatna, N.. *Ecopedagogy, Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2016.

Susanto, A.. *Pengembanagn Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar.* Jakarta: Kencana. 2014.

Von Glasersfeld, E.: 1995, 'A Constructivist Approach to Teaching', in L. Steffe and J. Gale (eds.), *Constructivism in Education*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey.

Wahab, A. A. *Metodedan Model-model Mengajar.* Bandung: Alfabeta. 2007.

Wijaya, D.. *Pendidikan Budayadan Karakter Bangsa untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: MitraWacana Media. 2017.

Zevin, J.. *Social Studies for The Twenty-First Century, Methods and Materials for Teaching in Middle and Scondary schools, (Third Edition)*. New York: Routledge Taylor and Francis Group. 2007.

SumberJurnal:

Brata, I. B. *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa*. *Jurnal Bakti Saraswati*. 05. 2016.

Dahliani, Soemarno, I.dan Setijanti, P.. *Local Wisdom In Built Environment In Globalization Era. International Journal of Education and Research.3* (6). 2015.

Dwiyani dan Sagirani. *Inculcation Method of Character Education Based on Personality Types Classification in Realizing Indonesia Golden Generation, International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 3* (2). 2014.

Ghamrawi, A.R.Najah. *Perception of Character Education: The Case of Lebanese School Leaders,* Journal of Leadership, 1 (4). 2015.

Hidayati, Abna, dkk.. *The Development of Character Education Curriculum For Elementary Student In West Sumatera,* International Journal of Education and Research, 2 (6). 2014.

Himawan, W. dkk.. *Local Wisdom from the Socio-Ecological Perspectives: Managing Former Mine Lands in Achieving Green Era IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). 19 (12).*2014.

Hudson, C.C. danWhisler, V.R.. *Contextual Teaching and Learning for Practitioners, Systemics, Cybernetics And Informatics Journal,* 6 (4). 2013.

Jihong Zhao, dkk. *"Individual value preferences among American police officers The Rokeach theory of human values revisited". Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 21 (1). 1998.

Kamaruddin, A. Syamsu., *Character Education and Students Social Behavior, Journal Educatian and Learning,* 6 (4). 2012

Kongprasertamorn, K.. *Local Wisdom, Environmental Protection And Community Development: The Clam Farmers In Tambon*

Bangkhunsai, Phetchaburi Province, Thailand, MANUSYA: Journal of Humanities 10 (1). 2007.

Kuasa, W, dkk.. *Local Wisdom Of Farmers In Meeting Of Local Food*, *IJSTAS*, 2 (1). 2015.

Marsono. *"Revitalisasi Kearifan Lokal Guna Mewujudkan Masyarakat Sejahtera" Jurnal Kemajuan Terkini*, 2 (5). 2007.

Maryono, *The Implementation Of Character Education Policy At Junior High Schools And Islamic Junior High Schools In Pacitan, International Journal of Education and Research, 3* (5).2015.

Meglino, Ravlin, *Individual values in organizations: concepts, Controversies and Research, Management* 24 (3). 1998.

Molesworth, dkk.. *Impact of Group Formation on Women's Empowerment and Economic Resilience in Rural Tajikistan, Journal of Rural and Community Development, 12 (1),*. 2017.

Mungmachon, R.. *Knowledge and local wisdom: community treasure. International Journal of Humanities and Social Science,* 2 (13). 2012.

Nurdin, S, E.. *The Policies on Civic Education in Developing National Character in Indonesia*, *International Education Studies*; 8,(8). 2015.

Nurfalah, F. & Kurniawati, I.. *Character Education Communication Model Nation to Form the Integrity of Self in Students, Asian Journal of Humanities and Social Sciences (*AJHSS), 3, (1). 2015.

Pala, A.. *The Need For Character Education, International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies*, 3, (2). 2011.

Sabani, D., dkk., *Improved Characters and Student Learning Outcomes Through Development of Character Education*

Based General Physics Learning Model, Journal of Education and Practice 6 (21). 2015.

Sihono, T.. *Contextual teaching and learning (CTL) Sebagai model pembelajaran ekonomi dalam KBK, Jurnal Ekonomi & Pendidikan,*1 (1). 2004.

Sutomo, I.. *Modification of character education into akhlaq education for the global community life, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 4, (2). 2014.

Syafruddin, A.. *Pancasila As Integration Philosophy of Education And National Character*, *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 2, (1). 2013.

Swan M., *Talking Sense About Learning Strategies*, *RELC Journal,* 1 (1) USA. 2008

Wagiran, *Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya)*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2 (3). 2012.

Sumber Internet:

Lihin, Model Pembelajaran, dalam http://www.referensimakalah.com/2013/01/model-pembelajaran-hands-on-mathematics.html, Diakses pada 09 September 2017.

Sudrajat, Akhmad. Model Pembelajaran Langsung [online]. dalam http:// akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/01/27/modelpembelajaran-langsung/. Diakses pada 14 Desember 2017.

Milausshotika, Yuni. *"Ilmu Pengetahuan Sosial"* dalam http://yunimilatussholikha.blogspot.com/2014/12/1_2.html diakses pada 21 Januari 2020.

Sumber Dokumen:

UU.No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

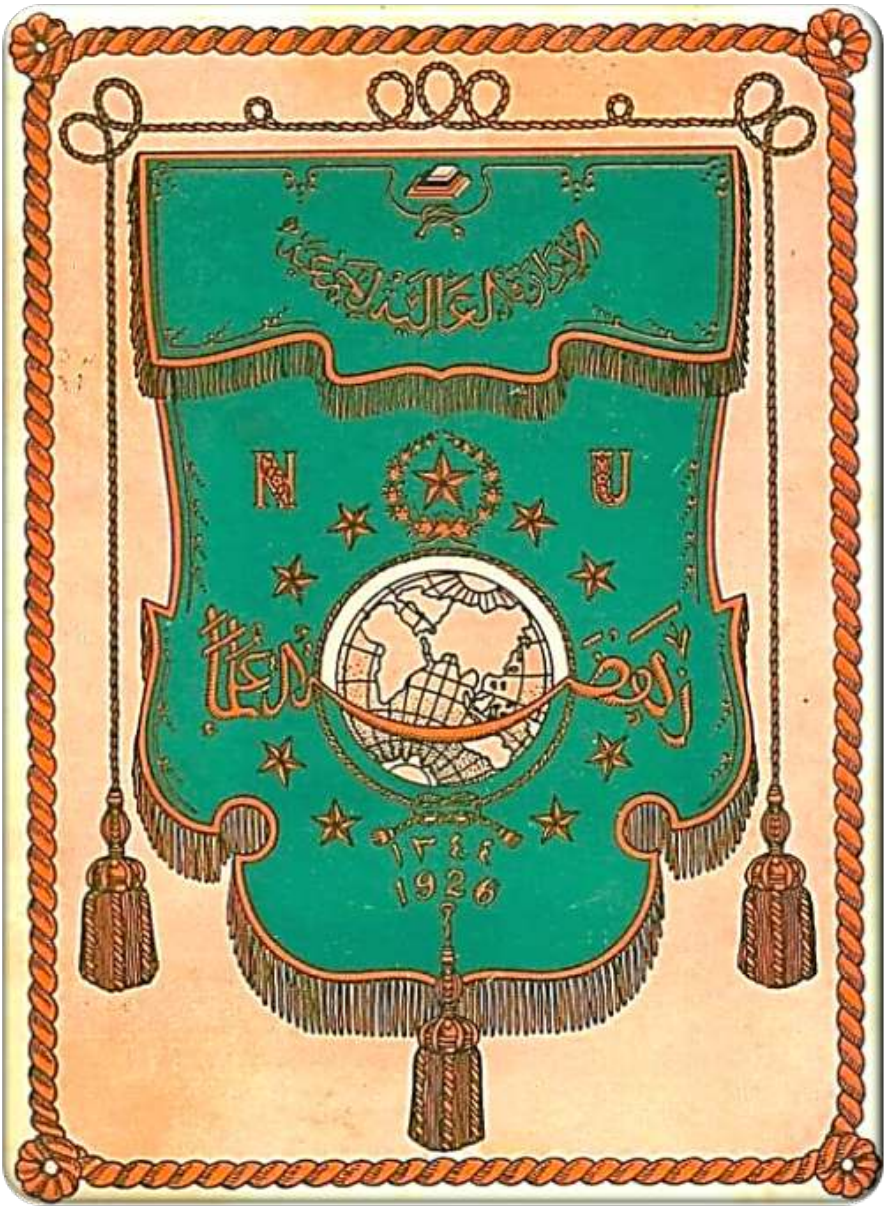
N U
١٣٤٤
1926

BIODATA PENULIS

Dr. Mohammad Liwa Irrubai, M. Pd. lahir di Landah, Lombok Tengah 1 Desember 1977, anak ke empat dari pasangan TGH. Moh. Tahir, A. Md. dan Ibunda Hj. Semah. Studi ditempuh di Sekolah Dasar di tanah kelahirannya SDN Landah tamat tahun 1990, sejak tahun 1990 hijrah ke Kota Mataram dengan studi di MTsN Mataram dan MAN 2 Mataram masing-masing ditamatkan tahun 1993 dan 1996. Memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag.) di STAIN Mataram tahun 2000 dengan predikat Cumlaude. Sejak PPL (semasa S1) tahun 1999 menjadi guru tidak tetap di SMA dan MA Selaparang Kediri, Lombok Barat sampai tahun 2001. Tahun 2001 diangkat sebagai dosen tetap yayasan pada Fakultas Agama Islam Universitas Nadhlatul Wathan (UNW) Mataram. Tahun 2002 berkesempatan melanjutkan studi ke Program Magister (S2) Pendidikan IPS Program Pascasarjana (PPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dengan beasiswa BPPS dari Dirjen Dikti dan tamat tahun 2004 dengan predikat *Cumlaude*. Selesai studi S2 menjadi dosen luar biasa di UIN Mataram. Desember 2008 diangkat sebagai dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Kerinci Provinsi Jambi. Tahun 2012 pindah menjadi dosen tetap pada Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sampai sekarang. Pada tahun 2015 kembali melanjutkan studi ke Program Doktor (S3) Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dengan beasiswa dari Program IsDB UIN Mataram dan diselesaikan tahun 2018. Saat ini sebagai Dosen Lektor Kepala pada mata

kuliah Pendidikan IPS dan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat (P2M) pada LP2M UIN Mataram.

Semasa mahasiswa aktif dalam organisasi; HMJ Tarbiyah STAIN Mataram (1997-1998) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cab. Mataram (1996-2000). Koordinator penelitian dan pengembangan pada Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) NTB (2013-2017). Saat ini aktif sebagai Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Mataram (2021 sampai sekarang).

Buku yang telah diterbitkan: Kearifan Lokal *Awik- awik* di Lombok diterbitkan oleh MG Pusblisher Bandung (2018), Etnopedagogi diterbitkan oleh Sanabil Mataram, NTB. (2020), Wawasan IPS diterbitkan oleh UIN Mataram Press, (2021), Pendalaman Materi IPS MTs./SMP diterbitkan oleh Sanabil Mataram, NTB (2021).

Beberapa karya ilmiah yang telah diterbitkan: Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Awik-awik Desa Sesaot dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Jurnal Sosio Didaktika UIN Jakarta (2019), *The Urgency of Humanities and Social Studies in Indonesian Education (Responding to Humanities Twilight in Japan),* Jurnal Tatsqif UIN Mataram (2020), Komparasi Tema-tema Pokok *Social Studies* di Negara Asia dan Amerika Serikat, Jurnal Sosio Didaktika UIN Jakarta (2021), Pendidikan Politik: Problematika Mendulang Legitimasi Masyarakat Adat Demi Politik Elektoral pada Pemilu Langsung di Manggarai (Studi Kritik Sosial terhadap Idealitas Politik '*Social Welfare*'), Jurnal Schemata Program Pascasarjana UIN Mataram (2021).

Penulis dapat dihubungi melalui Whatsaap 081803687548 dan email liwarubai@uinmataram.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

BIODATA PENULIS

Dr. Mohammad Liwa Irrubai, M.Pd.

lahir di Landah, Lombok Tengah 1 Desember 1977, anak ke empat dari pasangan TGH. Moh. Tahir, A. Md. dan Ibunda Hj. Semah. Studi ditempuh di Sekolah Dasar di tanah kelahirannya SDN Landah tamat tahun 1990, sejak tahun 1990 hijrah ke Kota Mataram dengan studi di MTsN Mataram dan MAN 2 Mataram masing-masing ditamatkan tahun 1993 dan 1996. Memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) di STAIN Mataram tahun 2000 dengan predikat Cumlaude. Sejak PPL (semasa S1) tahun 1999 menjadi guru tidak tetap di SMA dan MA Selaparang Kediri, Lombok Barat sampai tahun 2001.

Tahun 2001 diangkat sebagai dosen tetap yayasan pada Fakultas Agama Islam Universitas Nadhlatul Wathan (UNW) Mataram. Tahun 2002 berkesempatan melanjutkan studi ke Program Magister (S2) Pendidikan IPS Program Pascasarjana (PPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dengan beasiswa BPPS dari Dirjen Dikti dan tamat tahun 2004 dengan predikat Cumlaude. Selesai studi S2 menjadi dosen luar biasa di UIN Mataram. Desember 2008 diangkat sebagai dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Kerinci Provinsi Jambi. Tahun 2012 pindah menjadi dosen tetap pada Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sampai sekarang. Pada tahun 2015 kembali melanjutkan studi ke Program Doktor (S3) Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dengan beasiswa dari Program IsDB UIN Mataram dan diselesaikan tahun 2018. Saat ini sebagai Dosen Lektor Kepala pada mata kuliah Pendidikan IPS dan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat (P2M) pada LP2M UIN Mataram.

Semasa mahasiswa aktif dalam organisasi; HMJ Tarbiyah STAIN Mataram (1997-1998) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cab. Mataram (1996-2000). Koordinator penelitian dan pengembangan pada Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) NTB (2013-2017). Saat ini aktif sebagai Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Mataram (2021 sampai sekarang).

Buku yang telah diterbitkan: Kearifan Lokal Awik- awik di Lombok diterbitkan oleh MG Pusblisher Bandung (2018), Etnopedagogi diterbitkan oleh Sanabil Mataram, NTB. (2020), Wawasan IPS diterbitkan oleh UIN Mataram Press, (2021), Pendalaman Materi IPS SMP/MTs. diterbitkan oleh Sanabil Mataram, NTB (2021).

Beberapa karya ilmiah yang telah diterbitkan: Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Awik-awik Desa Sesaot dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Jurnal Sosio Didaktika UIN Jakarta (2019), The Urgency of Humanities and Social Studies in Indonesian Education (Responding to Humanities Twilight in Japan), Jurnal Tatsqif UIN Mataram (2020), Komparasi Tema-tema Pokok Social Studies di Negara Asia dan Amerika Serikat, Jurnal Sosio Didaktika UIN Jakarta (2021), Pendidikan Politik: Problematika Mendulang Legitimasi Masyarakat Adat Demi Politik Elektoral pada Pemilu Langsung di Manggarai (Studi Kritik Sosial terhadap Idealitas Politik 'Social Welfare'), Jurnal Schemata Program Pascasarjana UIN Mataram (2021).

Penulis dapat dihubungi melalui Whatsaap 081803687548 dan email liwarubai@uinmataram.ac.id

UIN MATARAM PRESS

ISBN 978-623-95499-5-4

9 786239 549954